

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Dasar Hukum
- 1.4 Struktur Organisasi
- 1.5 Kepegawaian
- 1.6 Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Perjanjian Kinerja
- 2.3 Indikator Kinerja Utama

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- Lampiran :**
- I. Perjanjian Kinerja Eselon II
 - II. Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV
 - III. Prestasi-Prestasi

IKHTISAR EKSEKUTIF

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, SWT dengan segala rahmat dan karunianya Laporan Kinerja (LKjIP) Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 telah selesai disusun. Penyusunan LKjIP ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan dan sumber dana lainnya (APBD Propinsi Sumatera Barat, APBN) Tahun Anggaran 2018. Dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, terciptanya system pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi serta diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik.

Penyusunan LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan tahun 2018 ini disusun berpedoman Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr wb...

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, SWT dengan segala rahmat dan karunianya Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 telah selesai disusun. Penyusunan LKj ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan dan sumber dana lainnya (APBD Propinsi Sumatera Barat, APBN) Tahun Anggaran 2018. Dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, terciptanya system pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi serta diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik.

Penyusunan LKj Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2018 ini disusun berpedoman Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor Tahun 53 Tahun 2014.

Painan, 20 Februari 2019

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



ERA SUKMA MUNAF, ST, MM

NIP. 19720925 199803 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Dinas ini terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan No. 32 Tahun 2010 tentang rincian Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Sebagai unsur pelaksana teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertugas mengembangkan dan memelihara Sarana dan Prasarana Wilayah yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Untuk itu Dinas menyusun rencana program dan kegiatan, baik yang bersifat jangka menengah maupun tahunan sesuai dengan kebutuhan dan perkiraan dana yang tersedia.

Pada Tahun Anggaran 2018, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai salah satu dinas penyelenggara urusan wajib yaitu Bidang Prasarana Jalan dan Tata Ruang dengan alokasi dana sebesar Rp. 230.123.802.758,- yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.038.970.263,- dan belanja langsung sebesar Rp. 225.084.832.495,- untuk mengelola sebanyak 19 Program dan 140 kegiatan. Dana program dan kegiatan prioritas yang diselenggarakan ini sesuai dengan PP No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan PP No. 3 Tahun 2008 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, LKPI Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggara Pemerintahan Daerah kepada DPRD kepada Masyarakat paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir harus dilaporkan secara transparan dan akuntabel dalam bentuk LKjIP (Laporan Kinerja) Pemerintah Daerah. Bahan LKjIP ini selanjutnya menjadi masukan bagi Pemda dalam menyusun LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah) Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Penyusunan LKj Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini adalah untuk dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat terhadap keseluruhan program dan kegiatan yang telah diselenggarakan selama 1 (satu) tahun anggaran. Sedangkan tujuannya adalah sebagai bahan masukan untuk dapat memperbaiki atau meningkatkan hasil kerja (kinerja) dinas pada tahun anggaran berikutnya, sehingga sasaran untuk meningkatkan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat dapat dicapai

1.3. DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2018 disusun mengacu kepada peraturan perundangundangan yang mengaturnya antara lain :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021.

1.4. STRUKTUR ORGANISASI

Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tersebut, susunan organisasi dinas ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah nomor 54 tahun 2016 tentang kedudukan,

susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja dan uraian tugas jabatan structural Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Sekretariat, terdiri dari
 - 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Jasa Konstruksi
- b. Bidang Tata Ruang dan Kebersihan
 - 1. Seksi Penataan Ruangan
 - 2. Seksi Pertamanan
 - 3. Seksi Kebersihan
- c. Bidang Bina Marga, terdiri dari
 - 1. Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan
 - 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - 3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- d. Bidang Cipta Karya, terdiri dari
 - 1. Seksi Perencanaan Keciaptakaryaan
 - 2. Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman
 - 3. Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Berdasarkan Perbub nomor 15 tahun 2015 di tetapkan 1 (satu) unit UPT yaitu:

UPT Dinas Laboratorium Pengujian Konstruksi
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas dan fungsi dari masing – masing unit kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditetapkan melalui Peraturan bupati nomor 54 tahun 2016 tentang penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan. Secara rinci, tugas pokok dan fungsi masing – masing unsur pejabat pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dan menetapkan seluruh urusan dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang untuk membantu

Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan urusan penyelenggaraan jalan, penataan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan, dan pembinaan jasa konstruksi serta urusan operasional kebersihan dan pertamanan;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- f. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang;
- g. pelaksanaan penelitian dan pengembangan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
- h. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
- i. pelaksanaan dukungan yang bersifat *substantif* kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Kepala Dinas mempunyai uraian tugas :

- a. merumuskan sasaran pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
- b. mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan dan pelayanan umum dengan sekretaris, kepala bidang dan bawahan dalam rangka penyatuan dan pencapaian sasaran dinas ;
- c. mengkoordinasikan dan mengarahkan proses pengembangan dinas;
- d. mengendalikan pengelolaan keuangan dan ketatausahaan serta perlengkapan dinas;

- e. mengatur, membina, mengendalikan Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk mencapai sasaran tugas sesuai dengan ketentuan;
- f. merumuskan sasaran penyusunan rencana strategi dinas;
- g. mengkoorganisasikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan serta Kegiatan Operasional Dinas;
- h. mengkoordinasikan penyusunan penetapan kinerja dan laporan kinerja dinas, melaporkan kepada kepala daerah secara berkala melalui Sekretaris Daerah ke Bagian Organisasi;
- i. menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah setiap akhir tahun ke Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- j. menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah setiap akhir tahun ke Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- k. mengkoordinasikan penanganan pengaduan dan peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat;
- l. menyusun kebijakan teknis pelaksanaan tugas pokok yang menjadi tanggung jawab dinas sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
- m. membina dan melaksanakan kerja sama serta koordinasi dengan instansi teknis yang menyangkut bidang tanggung jawab dinas;
- n. merumuskan sasaran dan alternatif kebijakan kepada Kepala Daerah tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
- o. menyusun dan merumuskan sasaran kebijakan operasional pada urusan masing-masing seksi di Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, dan Bidang Tata Ruang dan Kebersihan, serta UPTD Laboratorium;
- p. mengendalikan, monitoring dan evaluasi terhadap rencana strategik dan kebijakan operasional urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang meliputi urusan Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Tata Ruang dan Kebersihan serta UPTD Laboratorium, untuk mengetahui perkembangan, hambatan, dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
- q. mendisposisi surat masuk sesuai dengan bidang permasalahannya;

- r. menandatangani dan/atau memaraf persuratan dan dokumen lainnya sesuai dengan kewenangan menurut ketentuan;
- s. mengatur, memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan dan menetapkan pembinaan dan penilaian kinerja serta perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan prestasi kerja;
- t. mengkoordinasikan dan membuat laporan pelaksanaan program, strategis dan rencana kerja tahunan dinas secara berkala kepada kepala daerah; dan
- u. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan kepala daerah.

SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi dan penatausahaan urusan umum , kepegawaian , keuangan , melaksanakan urusan perencanaan dan pelaporan dinas serta melaksanakan urusan jasa konstruksi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris mempunyai fungsi :

1. pengkoordinasian kegiatan bidang-bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan dinas;
2. pengkoordinasian rencana, program, dan anggaran serta pelaporan dinas;
3. pengkoordinasian layanan administrasi dan ketatausahaan yang meliputi umum, kepegawaian, dan keuangan;
4. penyelenggaraan urusan jasa konstruksi.
5. pengkoordinasian pendataan dan informasi publik;
6. pengkoordinasian pengelolaan aset/barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang jasa;
7. penataan organisasi dan tata laksana; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Sekretaris mempunyai uraian tugas :

- a. merumuskan rencana kerja sekretariat dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan anggaran yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
- c. mengkoordinasikan, mengkonsultasikan setiap kegiatan sekretariat kepada kepala dinas;

- d. melaksanakan koordinasi sasaran penyusunan rencana strategi dinas, serta koordinasi penyusunan rencana kerja dan kegiatan operasional dinas;
- e. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan penetapan kinerja dan laporan kinerja dinas, melaporkan kepada kepala daerah secara berkala melalui kepala dinas;
- f. melaksanakan pengkoordinasian dan memfasilitasi pengisian Blanko Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Pajak-pajak (LP2P) Pribadi di lingkungan dinas;
- g. melaksanakan pengkoordinasian, mengarahkan dan mengatur penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati serta laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dan laporan keuangan pemerintah daerah setiap akhir tahun ke kepala dinas;
- h. melaksanakan pengkoordinasian laporan daftar hadir pegawai untuk disampaikan secara berkala ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
- i. mengkoordinasi, menyelia, dan mengarahkan tugas-tugas sekretariat kepada bawahan yang mengurus umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan, serta urusan pembinaan jasa konstruksi.;
- j. melaksanakan penataan naskah dinas, persuratan dan dokumen lainnya serta pengarsipan dan pemustakaan sesuai dengan kewenangan dan peraturan yang berlaku;
- k. melaksanakan pengkoordinasian inventarisasi dan merencanakan pengadaan barang/jasa kebutuhan dinas;
- l. melaksanakan pengkoordinasian inventarisasi dan penghapusan barang milik daerah;
- m. melaksanakan pengkoordinasian dan fasilitasi serta mengusulkan pembentukan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan dinas;
- n. memberikan saran dan masukan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- o. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan identifikasi permasalahan
- p. serta mencari alternatif pemecahannya sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh kepala dinas;

- q. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan sekretariat;
- r. mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai pembinaan staf;
- s. membuat, merumuskan dan mensosialisasikan hasil rapat dinas dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan dinas;
- t. menyelenggarakan tertib administrasi dan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- u. mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Daerah, rancangan Peraturan Bupati dan rancangan Keputusan Bupati dalam lingkup tugas dinas; dan
- v. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.

BIDANG BINA MARGA

Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Untuk menyiapkan rumusan serta menyelenggarakan urusan bidang jalan, jembatan, drainase dan penahan badan jalan yang meliputi: pengaturan, pembinaan, pendataan, perencanaan program, perencanaan teknis, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, rehabilitasi, pengawasan dan monitoring serta pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan.

menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang bina marga;
- b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang bina marga;
- c. pembinaan pelaksanaan tugas bidang bina marga; dan
- d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh kepala dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang bina marga mempunyai uraian tugas :

- a. membina, mengatur, mengarahkan dan membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang bina marga;
- c. menyusun konsep sasaran kegiatan bidang bina marga;
- d. mengkoordinasikan, memberikan saran dan masukan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang bina marga;

- e. mengkoordinasikan, menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategi bidang bina marga;
- f. mengkoordinasikan, menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja bidang bina marga;
- g. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan Penetapan Kinerja dan laporan kinerja bidang bina marga kepada kepala dinas melalui sekretaris;
- h. mengkoordinasikan dan mengarahkan kebijakan operasional pada bidang bina marga, yang meliputi urusan perencanaan jalan dan jembatan, pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan;
- i. mengkoordinasikan dan mengarahkan kebijakan operasional urusan perencanaan jalan dan jembatan;
- j. mengkoordinasikan dan mengarahkan kebijakan operasional urusan pembangunan jalan dan jembatan;
- k. mengkoordinasikan dan mengarahkan kebijakan operasional urusan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- l. mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang bina marga;
- m. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pengolahan data dan penyampaian laporan bidang bina marga;
- n. mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan jalan dan jembatan akibat bencana alam;
- o. menyusun konsep sasaran dan menyiapkan bahan perencanaan teknis kegiatan bidang bina marga;
- p. mengkoordinasikan, mengevaluasi pemutakhiran data jalan dan jembatan;
- q. mengkoordinasikan, mengevaluasi pengawasan ketaatan mutu atas pelaksanaan rencana teknis seluruh kegiatan di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
- r. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan bina marga;
- s. membuat laporan pelaksanaan program dan Rencana Kerja Tahunan bina marga; dan
- t. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh dinas.

BIDANG TATA RUANG DAN KEBERSIHAN

Bidang Tata Ruang dan Kebersihan mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas menyusun dan melaksanakan Kebijakan Daerah urusan penataan ruang dan kebersihan yang meliputi: penyelenggaraan penataan ruang daerah kabupaten; urusan operasional dan kegiatan kebersihan; urusan operasional dan kegiatan dan penataan lingkungan khusus dan pertamanan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Tata Ruang dan Kebersihan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis urusan penataan ruang dan kebersihan yang meliputi: penyelenggaraan penataan ruang daerah kabupaten; urusan operasional dan kegiatan kebersihan; urusan operasional dan kegiatan dan penataan lingkungan khusus dan pertamanan;
- b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tata ruang dan kebersihan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang tata ruang dan kebersihan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Tata Ruang dan Kebersihan mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan tugas urusan penataan ruang yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang, serta urusan operasional kebersihan dan pertamanan;
- b. mengelola penyusunan rencana dan program kerja bidang tata ruang dan kebersihan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada kepala seksi, sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. membina dan memotivasi, memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. mengoreksi konsep naskah dinas yang akan ditandatangani pimpinan;
- f. mengelola evaluasi bidang tata ruang dan kebersihan;
- g. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada kepala dinas, yang berkaitan dengan kegiatan bidang tata ruang dan kebersihan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
- h. melaporkan kepada kepala dinas, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;

- i. mengoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran lingkup bidang tata ruang dan kebersihan;
- j. bersama-sama dengan sekretaris melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran bidang tata ruang dan kebersihan dengan satuan kerja terkait/tim/panitia anggaran;
- k. menyusun dan menelaah peraturan dan perundang-undangan di bidang tata ruang dan kebersihan;
- l. mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan bidang tata ruang dan kebersihan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- m. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh kepala dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG CIPTA KARYA

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas pokok mengelola penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah urusan keciptakaryaan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang cipta karya;
- b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang cipta karya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang cipta karya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Cipta Karya mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan tugas penyelenggaraan dan penyediaan infrastruktur air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya;
- b. mengelola penyusunan rencana dan program kerja bidang cipta karya, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada kepala seksi, sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. membina dan memotivasi, memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan keciptakaryaan;

- f. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada kepala dinas, yang berkaitan dengan kegiatan tata ruang, tata bangunan, dan jasa konstruksi, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
- g. melaporkan kepada kepala dinas, setiap selesai melaksanakan tugas/ penugasan;
- h. mengoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran lingkup keciptakaryaan;
- i. bersama-sama dengan sekretaris melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran bidang dengan satuan kerja terkait/tim/panitia anggaran;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan bidang, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- k. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh kepala dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM PENGUJIAN KONTRUKSI

Kepala UPTD Laboratorium Pengujian Konstruksi mempunyai tugas memimpin Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Laboratorium Pengujian Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dalam Pelaksanaan Jasa Pengujian Mutu Bahan meliputi Pengujian Tanah, Beton, Aspal dan Bahan Bangunan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Pengujian Konstruksi mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan , Pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian serta mengawasi kegiatan laboratorium Pengujian konstruksi
- b. Penyusunan program kerja
- c. Penyiapan dan pemeliharaan Prasarana dan sarana Laboratorium
- d. Pelayanan jasa pengujian
- e. Pemungutan retribusi
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- g. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan

1.5 Kepegawaian

Dalam melaksanakan pekerjaan , Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember Tahun 2018 di laksanakan oleh 59 (lima puluh sembilan) orang pegawai negeri sipil terdiri dari 45 orang laki – laki atau 76.27 % laki – laki dan 14 orang perempuan atau 23.73 % perempuan

Tabel 1.1
Data Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017

Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai	Persentase
Laki – laki	59 Orang	76.27 %
Perempuan	14 Orang	23.73 %
Jumlah	59 Orang	100 %

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018

Sedangkan berdasarkan jenjang pendidikan , SDM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan didominasi oleh jenjang pendidikan S1

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	S2	3	5.08 %
2	D4/S1	36	61.02 %
3	D3	3	5.08 %
4	SLTA	17	28.82 %
	Jumlah	59 Orang	

1.6. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja (LKj) ini berisi pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan selama tahun 2018 tentang capaian kinerja (*performance results*) tahun 2018 yang diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja/TAPKIN (*performance agreement*) Tahun 2018 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir selatan dan struktur organisasi serta tujuan penyusunan LKj
2. Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan berbagai kebijakan umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan, Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 dan penetapan kinerja untuk tahun 2018
3. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2018.
4. Bab IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang atau Tahun 2018.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN 2016-2021

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya, diperlukan suatu perencanaan strategis melalui Penelaahan Visi dan Misi serta cara Pencapaian tujuan sasaran yang telah ditetapkan. Dari kelima misi Kabupaten Pesisir Selatan tersebut diatas, maka **misi kedua** adalah misi yang harus diemban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Misi kedua tersebut untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah dengan tujuan yaitu mewujudkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial dalam mendukung sektor unggulan daerah. Dari tujuan dan Misi kedua Kabupaten Pesisir Selatan tersebut, maka tujuan yang harus diemban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi: <i>Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis Dan Sejahtera</i>			
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah	1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi , pelayanan dasar dan pengembangan wilaayah	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Persentase jalan dalam kondisi baik dan persentase jembatan kondisi baik

		2. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat.	1. Persentase cakupan air minum/bersih
			2. Persentase cakupan sanitasi
		3. Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan publik	jumlah bangunan pelayanan public berfungsi baik
	1. Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan	1. Meningkatnya pelaksanaan penataan ruang dan penataan bangunan	1. Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang
			2. Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan tata bangunan
		2. Meningkatnya kebersihan lingkungan dan kawasan ruang terbuka hijau	1. Persentase sampah yang tertangani
			2. persentase kawasan penyediaan ruang terbuka hijau

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 ditetapkan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Begitupun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga telah membuat rencana kinerja seperti terlampir.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Persentase Jalan Dalam Kondisi baik	27.90%
		Persentase Jembatan Kondisi Baik	42.76%
2	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat	Persentase cakupan air minum / bersih dan persentase sanitasi	91.02% dan 73.13%
3	Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan public	Jumlah bangunan pelayanan publik berfungsi dengan baik	14 unit
4	Meningkatnya Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penataan Bangunan	1. Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang	20.30%
		2. Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan tata bangunan	17.24%
5	Meningkatnya Kualitas Lingkungan dan Kawasan Ruang Terbuka Hijau	1. Persentase sampah yang tertangani	39%
		2. Persentase kawasan penyediaan ruang terbuka hijau	66.14%

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengukuran keberhasilan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama satu tahun anggaran menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi yang disajikan dalam tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formula Perhitungan	Sumber Data Penanggung Jawab
(1)	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan dalam Kondisi baik Persentase Jembatan kondisi baik	$= \frac{\text{Panjang Jalan Kabupten Dalam Kondisi Baik}}{\text{Panjang seluruh Jalan Kabupaten di Daerah Tersebut}} \times 100\%$ $= \frac{\text{Panjang Jembatan Dalam Kondisi Baik}}{\text{Panjang seluruh Jembatan Kabupaten di Daerah Tersebut}} \times 100\%$	Bidang Bina Marga Bidang Bina Marga
2.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat	Persentase cakupan air minum/bersih Persentase Cakupan Sanitasi	$= \frac{\text{Jumlah rumah tangga pengguna air bersih}}{\text{jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$ $= \frac{\text{Jumlah rumah tangga bersanitasi}}{\text{jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$	Bidang Cipta Karya Bidang Cipta Karya
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penataan Bangunan	1.Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang 2. Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan tata bangunan	$\frac{\text{Rencana Pembangunan Dalam RDTR}}{\text{Realisasi Pembangunan}} \times 100\%$ $\frac{\text{Rencana Pembangunan Dalam RTBL}}{\text{Realisasi Pembangunan}} \times 100\%$	Bidang Tata Ruang dan Kebersihan
4	Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan public	Jumlah bangunan pelayanan publik berfungsi dengan baik.	Jumlah bangunan pelayanan publik yang di bangun / dipelihara pertahun selama 5 tahun	Bidang Cipta Karya
5.	Meningkatnya kebersihan lingkungan dan kawasan ruang terbuka hijau	1. Persentase sampah yang tertangani 2. Persentase kawasan penyediaan ruang terbuka hijau	$\frac{\text{Volume sampah tertangani}}{\text{Volume Produksi sampah}} \times 100\%$ $\frac{\text{Luas RTH yang Tersedia}}{\text{Luas RTH Publik Yang Seharusnya}} \times 100\%$	Bidang Tata Ruang dan Kebersihan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

Pengukuran Kinerja adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2018. Metode pengukuran kinerja digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

Tabel 3.5
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Gagal

3.1.1 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada tabel 3.6

NO.	MISI/TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2018			
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
MISI 2 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEREKONOMIAN DAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG TERKAIT DENGAN SEKTOR UNGGULAN DAERAH							
Tujuan : 1. Meningkatkan Penyediaan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi , pelayanan dasar dan pengembangan wilayah. 2. Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan.							
1.	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	1.	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	27.90	27.87	99.89
		2.	Persentase Jembatan Kondisi baik	%	42.76	39.78	93.03
2.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat	1.	Persentase cakupan air minum / bersih	%	91.02	91.22	100.22
		2.	Persentase cakupan sanitasi	%	73.13	73.17	100.05
3.	Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan publik	1.	Jumlah bangunan pelayanan public berfungsi dengan baik	Unit	14	12	85.71 %
4.	Meningkatnya pelaksanaan penataan ruang dan penataan bangunan	1.	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang	%	20.30	31.25	153.94
		2.	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan tata bangunan	%	17.24	17.24	100
5.	Meningkatnya kebersihan lingkungan dan kawasan ruang terbuka hijau	1.	Persentase sampah yang tertangani	%	39	37.20	95.38
		2	Persentase kawasan penyediaan ruang terbuka hijau	%	66.14	66.14	100

3.1.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 sebagaimana tercantum pada tabel 3.2. selanjutnya pada sub bab ini disajikan analisis capaian kinerja per sasaran strategis untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan sebagai berikut :

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan Jembatan

Sasaran ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke-2 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2016 – 2021 Yakni : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Perekonomian Sosial Yang Terkait Dengan Sektor Unggulan Daerah, sasaran ini memiliki 2 (dua) Indikator kinerja yakni:

- a. Persentase jalan dalam kondisi baik
- b. Persentase jembatan kondisi baik

Tabel 3.7

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Jalan dan Jembatan Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Jalan dalam kondisi baik	%	27.90	27.87	99.89
2	Jembatan Kondisi Baik	%	42.76	39.78	93.03

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pessel

1. Persentase Jalan Dalam kondisi baik

Persentase jalan kondisi baik merupakan indicator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan . Dengan panjang jalan Kabupaten sepanjang 2333.18 Km, di targetkan pada akhir tahun 2018 persentase jalan kondisi baik dapat menjadi 27.90 %. Dengan realisasi 27.87 % dan pencapaian atas target sebesar 99.89% tersebut maka klarifikasi penilaian untuk jalan kondisi baik adalah sangat baik.

Dari data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan, jumlah panjang jalan kabupaten berdasarkan SK Bupati Tahun 2015 adalah 2.333, 18 Km .

Tabel 3.8
Rekapitulasi Daftar Jalan Jaringan Induk Kabupaten
Menurut Jenis Permukaan dan Kondisi Tahun 2018

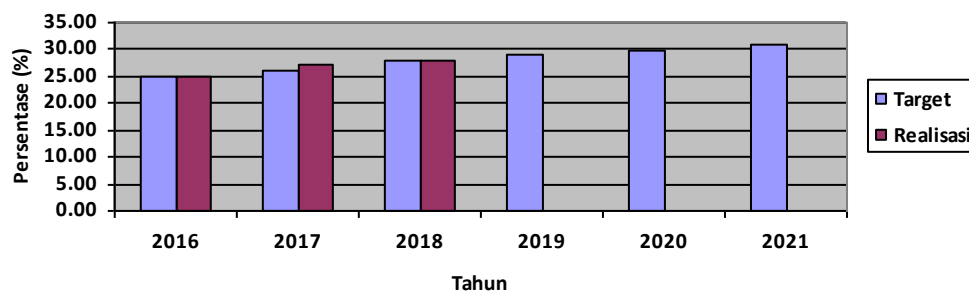
No	Kecamatan	Panjang Jalan Menurut Permukaan								Panjang Jalan (Km)	Panjang Jalan Menurut Kondisi								Panjang Jalan (Km)
		Aspal		Kerikil		Tanah		Beton			Baik		Sedang		Rusak		Rusak Berat		
		(Km)	%	(Km)	%	(Km)	%	(Km)	%		(Km)	%	(Km)	%	(Km)	%	(Km)	%	
1	KOTO XI TARUSAN	48.90	37.64%	10.20	7.85%	31.30	24.10%	39.50	30.41%	129.90	42.55	32.76%	25.50	19.63%	25.85	19.90%	36.00	27.71%	129.90
2	BAYANG	72.78	57.40%	8.42	6.64%	17.90	14.12%	27.70	21.85%	126.80	77.92	61.45%	19.50	15.38%	12.50	9.86%	16.88	13.31%	126.80
3	BAYANG UTARA	6.20	15.50%	3.50	8.75%	14.60	36.50%	15.70	39.25%	40.00	6.70	16.75%	7.90	19.75%	4.90	12.25%	20.50	51.25%	40.00
4	IV JURAI	88.80	58.91%	6.50	4.31%	39.75	26.37%	15.70	10.41%	150.75	70.70	46.90%	14.80	9.82%	18.75	12.44%	46.50	30.85%	150.75
5	BATANG KAPAS	44.35	40.35%	29.90	27.21%	10.90	9.92%	24.75	22.52%	109.90	46.60	42.40%	16.80	15.29%	27.85	25.34%	18.65	16.97%	109.90
6	SUTERA	77.20	38.18%	63.84	31.57%	52.10	25.77%	9.06	4.48%	202.20	54.58	26.99%	22.40	11.08%	30.44	15.05%	94.78	46.87%	202.20
7	LENGAYANG	98.65	37.35%	61.33	23.22%	64.15	24.29%	40.02	15.15%	264.15	97.37	36.86%	29.58	11.20%	42.20	15.98%	95.00	35.96%	264.15
8	RANAH PESISIR	69.90	46.41%	47.00	31.21%	17.75	11.79%	15.95	10.59%	150.60	52.85	35.09%	20.75	13.78%	48.70	32.34%	28.30	18.79%	150.60
9	LINGGO SARI BAGANTI	101.18	46.52%	55.15	25.36%	55.02	25.30%	6.15	2.83%	217.50	80.33	36.93%	18.20	8.37%	53.47	24.58%	65.50	30.11%	217.50
10	AIRPURA	28.45	18.33%	70.25	45.26%	45.40	29.25%	11.10	7.15%	155.20	29.35	18.91%	11.30	7.28%	56.85	36.63%	57.70	37.18%	155.20
11	PANCUNG SOAL	17.28	15.94%	42.50	39.21%	39.45	36.40%	9.15	8.44%	108.38	13.30	12.27%	11.58	10.68%	35.35	32.62%	48.15	44.43%	108.38
12	BASA AMPEK BALAI	15.40	22.65%	29.70	43.68%	16.50	24.26%	6.40	9.41%	68.00	10.70	15.74%	8.60	12.65%	8.00	11.76%	40.70	59.85%	68.00
13	RANAH IV HULU TAPAN	6.10	10.55%	10.80	18.69%	35.80	61.94%	5.10	8.82%	57.80	8.20	14.19%	1.80	3.11%	9.20	15.92%	38.60	66.78%	57.80
14	LUNANG	33.10	10.58%	91.30	29.17%	185.60	59.30%	3.00	0.96%	313.00	18.20	5.81%	12.70	4.06%	90.20	28.82%	191.90	62.31%	313.00
15	SILAUT	41.50	17.36%	100.95	42.24%	91.70	38.37%	4.85	2.03%	239.00	40.83	17.08%	29.20	12.22%	83.97	35.13%	85.00	35.56%	239.00
TOTAL		749.79	32.14%	631.34	27.06%	717.92	30.77%	234.13	10.03%	2333.18	650.18	27.87%	250.61	10.74%	548.23	23.50%	884.16	37.90%	2333.18

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pesisir Selatan

Mengacu pada renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021 berikut target yang ingin dicapai dalam indicator Jalan Kabupaten Kondisi Baik.

Tabel 3.9 Target dan Realisasi Jalan Kondisi Baik

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Target Capaian Setiap Tahun (%)	24.90	25.90	27.90	28.90	29.90	30.90
2	Realisasi (%)	24.90	27.00	27.87			



Gambar 3.1
Target dan realisasi per tahun Jalan Kondisi baik menurut Renstra 2016 -2021

Capaian indikator persentase panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik di hitung dengan menggunakan rumus di bawah ini :

$$= \frac{\text{Panjang Jalan Kabupten Dalam Kondisi Baik}}{\text{Panjang seluruh Jalan Kabupaten di Daerah Tersebut}} \times 100\%$$

Capaian Indikator persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik di peroleh dari data inspeksi kondisi jalan tahun 2018 dan pemutakhiran data base jalan. Pemutakhiran data base jalan dilakukan pada bulan desember . Pemutakhiran data base jalan merupakan akumulasi dari hasil kegiatan fisik jalan baik itu pekerjaan pembangunan, peningkatan kuantitas dan pemeliharaan jalan. Data Kondisi jalan menyajikan total panjang jalan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan dalam kondisi baik, Sedang , Rusak dan Rusak Berat. Berdasarkan data kondisi jalan tersebut dapat di hitung persentase panjang jalan status kabupaten dalam kondisi baik dan kondisi mantap. Hasil Pelaksanaan Kegiatan untuk mendukung indikator persentase jalan dalam kondisi baik seperti pada gambar berikut :



Peningkatan jalan alai – koto tarok kec Sutera Tahun 2018.

Definisi operasional ke- PU-an tentang jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik di bagi panjang seluruh jalan kabupaten di Pesisir Selatan Tahun 2018 adalah :

$$= \frac{650.18}{2333.18} \times 100\% = 27.87\%$$

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Indikator Persentase Panjang Jalan Status Kabupaten Dalam Kondisi Baik
Tahun 2016 s/d 2018

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian		
			2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	24.90	27.08	27.87	100.00	104.25	99.89

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian indicator persentase panjang jalan Status Kabupaten Dalam Kondisi Baik dalam 2 (dua) tahun pelaksanaan RPJMD dalam kategori sangat baik.

Tabel 3.11 Jenis, Kondisi dan Status Jalan di Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Jenis Kondisi dan	Status Jalan						
		Jalan Kabupaten						
		2012 Km	2013 Km	2014 Km	2015 Km	2016 Km	2017 Km	2018 Km
A	Jenis Permukaan							
	1 Aspal	728.35	748.65	755.37	691.19	726.88	739.81	749.79
	2 Kerikil	502.29	483.79	492.66	625.52	670.03	637.60	631.34
	3 Beton	397.07	397.17	395.23	193.25	202.37	231.90	234.13
	4 Tanah	695.78	693.88	680.30	823.22	733.90	723.87	717.92
Jumlah		2323.49	2323.49	2323.56	2333.18	2333.18	2333.18	2333.18
B	Kondisi Jalan							
	1 Baik	857.73	866.41	931.14	798.49	580.87	630.01	650.18
	2 Sedang	704.03	704.1	653.34	202.02	262.61	246.48	250.61
	3 Rusak	368.35	363.85	357.88	653.57	641.46	558.11	548.23
	4 Rusak Berat	393.38	389.13	381.13	679.10	848.25	898.58	884.16
Jumlah		2323.49	2323.49	2,323.49	2,333.18	2,333.18	2,333.18	2,333.18
C	Panjang Jalan							
	1 Kelas I							
	2 Kelas Jalan II							
	3 Kelas Jalan III	232.90	232.90	232.90	232.90	232.90	232.90	232.90
	4 Kelas Jalan III A	376.50	376.50	376.50	376.50	376.50	376.50	376.50
	5 Kelas Jalan III B	413.26	413.26	413.26	413.26	413.26	413.26	413.26
	6 Kelas Jalan III C	-	-	-	-	-	-	-
	7 Kelas Tidak Rinci	1300.83	1300.83	1300.83	1310.52	1310.52	1310.52	1310.52
Jumlah		2323.49	2323.49	2323.49	2333.18	2333.18	2333.18	2333.18

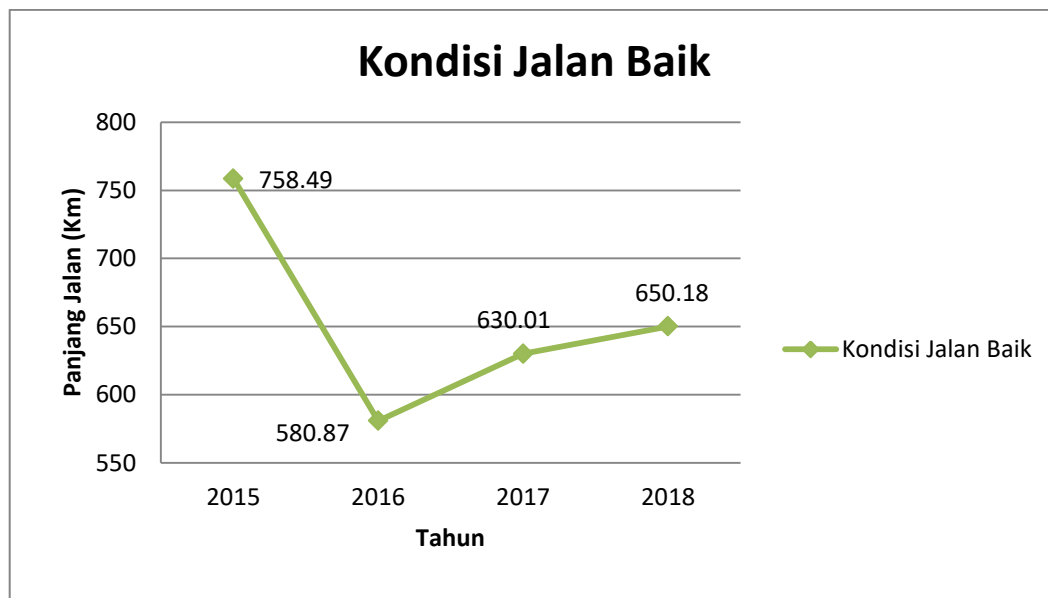
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pessel

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik mengalami peningkatan sepanjang 20.17 km pada tahun 2018.

Begitu juga dengan jenis permukaan jalan aspal mengalami kenaikan di tahun 2018 yaitu sepanjang 9.98 km.

Tabel 3.12
Kenaikan Panjang jalan kondisi baik tahun 2015 s/d 2018

No	Uraian	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	Panjang Jalan Baik (Km)	758,49	580,87	630,01	650.18



Gambar 3. 2 Grafik Kenaikan Panjang jalan kondisi baik tahun 2015 s/d 2018

Adapun kondisi kemantapan jalan provinsi Sumatera Barat dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.13 KONDISI KEMANTAPAN RUAS JALAN PROVINSI TAHUN 2018

NO	NO RUAS	NAMA RUAS	PERKERASAN BADAN JALAN				PANJANG (SK)	KONDISI JALAN BERDASARKAN IRI								KEMANTAPAN JALAN			
			ASPAL	TEFLOID / KERIKIL	TANAH	BETON		BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT		MANTAP		TIDAK MANTAP	
								(KM)	%	(KM)		(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%
1	013.018	INDRAPURA - MUARA SAKAI	7.300	0.000	0.000	0.000	7.300	2.600	2.740	3.154	70.342	0.883	18.699	0.663	8.219	5.754	78.822	1.546	21.178
2	06.083	TELUK KABUNG - MANDEH – TARUSAN	31.112	0.000	12.988	0.000	44.100	16.609	37.662	24.503	55.562	0.000	0.000	2.988	6.776	41.112	93.224	2.988	6.776
3	06.086	SURANTIAH - KAYU ARO – LANGGAI	9.700	0.000	17.360	0.640	27.700	0.500	1.805	13.500	48.736	1.300	4.693	12.400	44.765	14.000	50.542	13.700	49.458
4	06.100	BATU BATEMBAK - PELABUHAN PANASAHAN	1.200	0.000	0.000	0.000	1.200	0.000	0.000	1.200	32.917	0.000	33.750	0.000	33.333	1.200	100.000	0.000	0.000

2. Persentase Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik

Capaian indikator persentase panjang jembatan Kabupaten dalam kondisi baik di hitung dengan menggunakan rumus di bawah ini :

$$= \frac{\text{Panjang jembatan dalam kondisi baik}}{\text{Panjang Seluruh Jembatan Kabupaten di Daerah Tersebut}} \times 100 \%$$

Capaian Indikator persentase panjang jembatan kabupaten dalam kondisi baik di peroleh dari data kondisi jembatan tahun 2018. Data Kondisi jembatan menyajikan panjang jembatan kabupaten dalam kondisi Baik, Sedang , Rusak Ringan dan Rusak Berat. Data ini merupakan hasil pemutakhiran kondisi jembatan yang ada dengan pembaharuan kondisi terakhir berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan jembatan dan pemeliharaan jembatan. Hasil Pelaksanaan Pembangunan Jembatan pada tahun 2018 seperti terlihat pada gambar berikut :



Pembangunan Jembatan Nyiur Gading Kec.Lengayang Tahun 2018

Dari data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan, jumlah jembatan tahun 2018 adalah unit 450 jembatan, seperti terlihat tabel berikut :

Tabel 3.14 Rekapitulasi Data Dasar Jembatan Menurut Kondisi Tahun 2018

No	Kecamatan	Tipe/Kondisi				
		Kondisi				Jumlah Jembatan
		Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	KOTO XI TARUSAN	9	14	2	3	28
2	BAYANG	9	10	2	0	21
3	BAYANG UTARA	1	1	7	0	9
4	IV JURAI	10	11	1	1	23
5	BATANG KAPAS	11	11	11	0	33
6	SUTERA	5	9	2	1	17
7	LENGAYANG	30	29	10	2	71
8	RANAH PESISIR	17	13	11	1	42
9	LINGGO SARI BAGANTI	21	12	3	0	36
10	AIRPURA	3	7	4	0	14
11	PANCUNG SOAL	8	14	4	0	26
12	BASA AMPEK BALAI	7	6	1	0	14
13	RANAH IV HULU TAPAN	2	2	0	0	4
14	LUNANG	18	13	19	2	52
15	SILAUT	28	9	20	3	60
<i>TOTAL</i>		<i>179</i>	<i>161</i>	<i>97</i>	<i>13</i>	<i>450</i>

Tabel 3.14 Rekapitulasi Data Dasar Jembatan Menurut Kondisi Tahun 2017

No	Kecamatan	Kondisi				Jumlah Jembatan
		Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	KOTO XI TARUSAN	9	10	7	2	28
2	BAYANG	8	6	6	1	21
3	BAYANG UTARA	1	0	8	0	9
4	IV JURAI	9	7	6	1	23
5	BATANG KAPAS	10	6	16	1	33
6	SUTERA	5	10	1	1	17
7	LENGAYANG	30	23	12	6	71
8	RANAH PESISIR	17	10	13	2	42
9	LINGGO SARI BAGANTI	18	12	3	2	35
10	AIRPURA	3	6	5	0	14
11	PANCUNG SOAL	7	14	3	2	26
12	BASA AMPEK BALAI TAPAN	7	6	0	1	14
13	RANAH IV HULU TAPAN	2	0	2	0	4
14	LUNANG	18	7	22	5	52
15	SILAUT	28	7	16	9	60
TOTAL		172	124	120	33	449

Sumber Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pessel

Tabel 3.15 Rekapitulasi Data Dasar Jembatan Menurut Kondisi Tahun 2016

No	Kecamatan	Kondisi				Jumlah Jembatan
		Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	KOTO XI TARUSAN	8	8	5	6	27
2	BAYANG	6	6	6	3	21
3	BAYANG UTARA	0	0	9	0	9
4	IV JURAI	3	2	16	2	23
5	BATANG KAPAS	5	0	28	0	33
6	SUTERA	1	5	8	3	17
7	LENGAYANG	16	25	24	6	71
8	RANAH PESISIR	8	0	33	1	42
9	LINGGO SARI BAGANTI	6	0	27	2	35
10	AIRPURA	3	0	11	0	14
11	PANCUNG SOAL	4	0	20	2	26
12	BASA AMPEK BALAI TAPAN	6	0	8	0	14
13	RANAH IV HULU TAPAN	0	0	4	0	4
14	LUNANG	20	0	30	2	52
15	SILAUT	24	0	29	7	60
TOTAL		110	46	258	34	448

Sumber Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pessel

Tabel 3.16 Rekapitulasi Data Dasar Jembatan Menurut Kondisi Tahun 2015

No	Kecamatan	Kondisi				Jumlah Jembatan
		Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	KOTO XI TARUSAN	7	0	20	1	28
2	BAYANG	5	0	21	1	27
3	BAYANG UTARA	0	0	9	0	9
4	IV JURAI	4	0	18	1	23
5	BATANG KAPAS	5	0	28	0	33
6	SUTERA	4	0	21	0	25
7	LENGAYANG	14	0	54	3	71
8	RANAH PESISIR	8	0	33	1	42
9	LINGGO SARI BAGANTI	6	0	27	2	35
10	AIRPURA	3	0	11	0	14
11	PANCUNG SOAL	4	0	20	2	26
12	BASA AMPEK BALAI TAPAN	6	0	8	0	14
13	RANAH IV HULU TAPAN	0	0	4	0	4
14	LUNANG	21	0	30	1	52
15	SILAUT	25	0	28	7	60
TOTAL		112	0	332	19	463

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

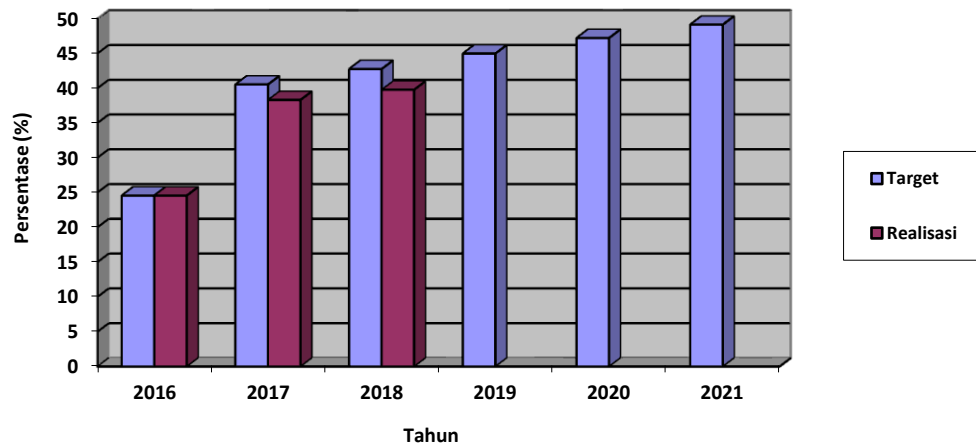
Persentase panjang Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik Tahun 2018 adalah :

$$= \frac{179}{450} \times 100\% = 39.78 \%$$

Mengacu pada renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021 berikut target yang ingin dicapai dalam indikator Jembatan Kabupaten Kondisi Baik.

Tabel 3.17 Target dan Realisasi Jembatan Kondisi Baik

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Target Capaian Setiap Tahun (%)	24.55	40.53	42.76	44.98	47.22	49.14
2	Realisasi	24.55	38.31	39.78			

**Gambar 3.3**

Target dan realisasi per tahun Jembatan Kondisi baik menurut Renstra 2016 -2021

Adapun Capaian Indikator jembatan kondisi baik, sebagai berikut :

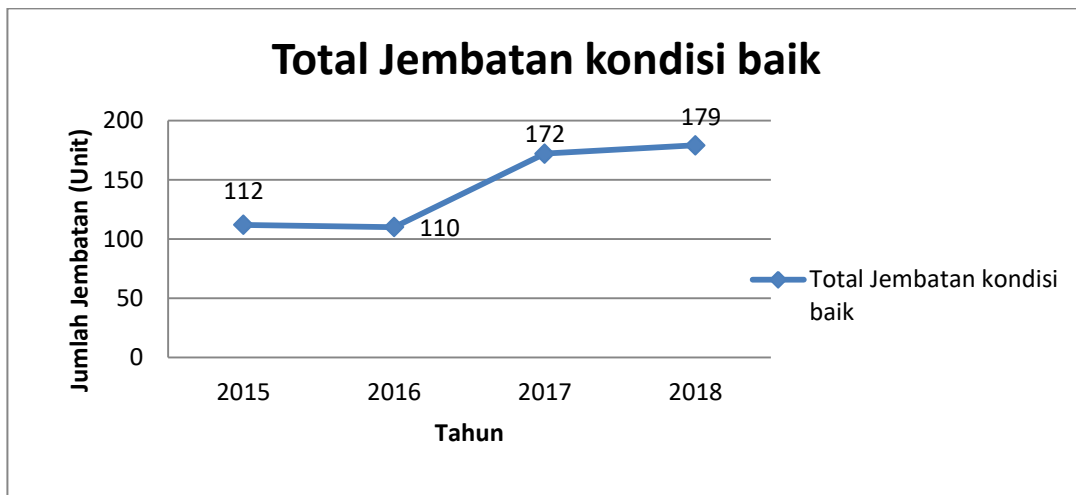
Tabel 3.18
Capaian Kinerja Indikator Persentase Panjang Jembatan Dalam Kondisi Baik Tahun 2016 s/d 2018

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian		
			2016	2017	2018	2016	2017	2018
1.	Jembatan kondisi baik	%	24.55	38.31	39.78	100	94.52	93.03

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian indicator persentase panjang Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik dalam 2 (dua) tahun pelaksanaan RPJMD dalam kategori sangat baik dan dapat di lihat bahwa jumlah jembatan dalam kondisi baik mengalami peningkatan sebanyak 7 Unit pada tahun 2018.

Tabel 3.19
Kenaikan Jumlah jembatan kondisi baik tahun 2015 s/d 2018

No	Uraian	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	Jembatan Kondisi Baik (unit)	112	110	172	179



Gambar 3.4 Kenaikan jumlah jembatan kondisi baik tahun 2015 s/d 2018

Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Keberhasilan Meningkatnya Kualitas infrastruktur Jalan dan Jembatan adalah :

1. Komitmen Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Maupun Pemerintah Pusat dan Propinsi dalam mendukung aksesibilitas jalan dan jembatan untuk menjamin masyarakat sampai pada tempat asal – tujuan tepat waktu, aman dan nyaman sangat tinggi baik dari sisi penyediaan dana maupun pembinaan dan pengawasan mutu jalan daerah.
2. Kegiatan Peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan telah menjadi kegiatan rutin pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan baik secara berkala, rutin maupun periodic setiap tahunnya.

Hambatan / Permasalahan Dalam Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Jalan dan Jembatan adalah :

1. Data base jalan dan Jembatan belum terupdate secara maksimal.
2. Kegiatan inspeksi kondisi jalan dan jembatan belum optimal dilaksanakan untuk semua unit jembatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan

Strategi / Upaya Pemecahan Masalah adalah :

1. Penyiapan Dokumen pemetaan jaringan jalan dan jembatan yang terupdate sesuai kebutuhan setiap tahunnya.
2. Inspeksi kondisi jalan dan jembatan harus dilaksanakan secara rutin
3. Peningkatan Kualitas sumber daya aparatur dan penyedia jasa sebagai unsur pelaksana pembangunan melalui diklat teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengawasan kegiatan fisik jalan dan jembatan.

Program – program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan antara lain dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.20
Program yang mendukung pencapaian target indikator kinerja yang di tetapkan

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	9.474.599.146,95	8.879.191.922	93,72
2.	Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan	69.834.358.490,55	63.708.786.890	91,23
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	1.102.467.321,50	1.101.831.043	99,94
4	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - gorong	1.582.886.115,50	1.557.663.783	98,41
	Jumlah	81.994.311.074,4	75.247.473.638	91,78

Program – program diatas tersebut di dukung oleh dana sebesar Rp. 81.994.311.074,4 terealisasi sebesar Rp. 75.247.473.638 atau 91.78%. Ini berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 terdapat efisiensi anggaran sebesar 8,22% atau Rp. 6.746.837.436,4

Sasaran 2 : Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat

Sasaran ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke-2 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2016 – 2021 Yakni : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Perekonomian Sosial Yang Terkait Dengan Sektor Unggulan Daerah, sasaran ini memiliki 2 (dua) Indikator kinerja yakni :

a. Persentase cakupan air minum /bersih

b. Persentase cakupan sanitasi

Tabel 3.21

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase cakupan air minum /bersih	%	91.02	91.22	100.22
2	Persentase cakupan sanitasi	%	73.13	73.17	100.05

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan

1. Cakupan air minum /bersih

Capaian indikator Persentase cakupan air minum /bersih di hitung dengan menggunakan rumus di bawah ini :

$$= \frac{\text{Jumlah rumah tangga pengguna air bersih}}{\text{jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$$

Capaian indikator Persentase cakupan air minum /bersih tahun 2018 di peroleh dari data jumlah tambahan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Tahun 2018

Yaitu sambungan rumah PDAM tahun 2018, sambungan rumah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 dan Sambungan Rumah Pamsimas Tahun 2018.

Analisa Data Cakupan Akses Penyediaan Layanan Air Minum Kabupaten Pesisir Selatan sampai tahun 2018 dapat di lihat sebagai berikut :

Tabel 3.22
ANALISA DATA CAKUPAN AKSES PENYEDIAAN LAYANAN AIR MINUM KABUPATEN PESIR SELATAN
SAMPAI TAHUN 2018

No	KECAMATAN / NAGARI		JUMLAH RUMAH TANGGA	AKSES PENYEDIAAN AIR MINUM						AKSES AMAN		AKSES TIDAK AMAN		DAERAH
				JARINGAN PERPIPAAN				NON PERPIPAAN						RAWAN AIR
				PDAM		NON PDAM		(SGL + PMA + PAH)						(NAGARI/KEK.)
				(Ruta)	(%)	(Ruta)	(%)	(Ruta)	(%)	(Ruta)	(%)	(Ruta)	(%)	
	JUMLAH		105,559	22,873	21.67	15,831	15.00	57,592	54.56	96,296	91.22	9,263	8.78	
I	SILAUT		3,481	-	-	946	27.18	2,214	63.60	3,160	90.78	321	9.22	
	1	Silaut	667	-	-	249	37.33	373	55.92	622	93.25	45	6.75	
	2	Sambungo	247	-	-	-	-	180	72.87	180	72.87	67	27.13	
	3	Air Hitam	326	-	-	85	26.07	192	58.90	277	84.97	49	15.03	
	4	Lubuk Bunta	373	-	-	40	10.72	293	78.55	333	89.28	40	10.72	
	5	Durian Seribu	309	-	-	167	54.05	132	42.72	299	96.76	10	3.24	
	6	Pasir Binjai	442	-	-	188	42.53	253	57.24	441	99.77	1	0.23	
	7	Talang Binjai	168	-	-	-	-	137	81.55	137	81.55	31	18.45	
	8	Sungai Serik Silaut	262	-	-	-	-	240	91.60	240	91.60	22	8.40	
	9	Sungai Pulai Silaut	373	-	-	47	12.60	290	77.75	337	90.35	36	9.65	
	10	Sungai Sirah Silaut	314	-	-	170	54.14	124	39.49	294	93.63	20	6.37	
II	LUNANG		4,962	-	-	1,065	21.46	3,461	69.75	4,526	91.21	436	8.79	
	1	Lunang	850	-	-	-	-	777	91.41	777	91.41	73	8.59	

	2	Lunang Selatan	436	-	-	-	-	395	90.60	395	90.60	41	9.40	
	3	Lunang Utara	415	-	-	-	-	356	85.78	356	85.78	59	14.22	
	4	Lunang Barat	371	-	-	247	66.58	93	25.07	340	91.64	31	8.36	
	5	Sindang Lunang	386	-	-	100	25.91	247	63.99	347	89.90	39	10.10	
	6	Lunang Satu	723	-	-	110	15.21	596	82.43	706	97.65	17	2.35	
	7	Lunang Tengah	308	-	-	-	-	256	83.12	256	83.12	52	16.88	
	8	Pondok Pariang Lunang	272	-	-	30	11.03	211	77.57	241	88.60	31	11.40	
	9	Lunang Dua	665	-	-	578	86.92	52	7.82	630	94.74	35	5.26	
	10	Lunang Tiga	536	-	-	-	-	478	89.18	478	89.18	58	10.82	
III	BASA AMPEK BALAI TAPAN		3,179	593	18.65	273	8.59	2,089	65.71	2,955	92.95	224	7.05	
	1	Tapan	202	36	17.82	-	-	133	65.84	169	83.66	33	16.34	
	2	Batang Arah Tapan	528	167	31.63	-	-	346	65.53	513	97.16	15	2.84	
	3	Pasar Tapan	346	54	15.61	-	-	235	67.92	289	83.53	57	16.47	
	4	Ampang Tulak Tapan	195	-	-	-	-	188	96.41	188	96.41	7	3.59	
	5	Koto Anau Tapan	362	-	-	-	-	321	88.67	321	88.67	41	11.33	
	6	Dusun Baru Tapan	158	-	-	-	-	145	91.77	145	91.77	13	8.23	
	7	Tanjung Pondok Tapan	423	-	-	-	-	382	90.31	382	90.31	41	9.69	
	8	Batang Betung Tapan	503	336	66.80	-	-	163	32.41	499	99.20	4	0.80	
	9	Riak Danau Tapan	271	-	-	82	30.26	176	64.94	258	95.20	13	4.80	
	10	Bukit Buai Tapan	191	-	-	191	100.00	-	-	191	100.00	-	-	
IV	RANAH AMPEK HULU		3,494	102	2.92	40	1.14	2,854	81.68	2,996	85.75	498	14.25	

	TAPAN													
	1	Kubu Tapan	452	-	-	-	-	410	90.71	410	90.71	42	9.29	
	2	Talang Koto Pulai Tapan	322	86	26.71	-	-	199	61.80	285	88.51	37	11.49	
	3	Binjai Tapan	171	-	-	40	23.39	106	61.99	146	85.38	25	14.62	
	4	Sungai Gambir Sako Tapan	153	-	-	-	-	86	56.21	86	56.21	67	43.79	
	5	Simpang Gunung Tapan	206	-	-	-	-	144	69.90	144	69.90	62	30.10	
	6	Kampung Tengah Tapan	485	16	3.30	-	-	436	89.90	452	93.20	33	6.80	
	7	Sungai Pinang tapan	527	-	-	-	-	465	88.24	465	88.24	62	11.76	
	8	Tebing Tinggi Tapan	610	-	-	-	-	540	88.52	540	88.52	70	11.48	
	9	Talang Balarik Tapan	326	-	-	-	-	275	84.36	275	84.36	51	15.64	
	10	Limau Purut Tapan	242	-	-	-	-	193	79.75	193	79.75	49	20.25	
V	PANCUNG SOAL		6,107	1,209	19.80	774	12.67	3,621	59.29	5,604	91.76	503	8.24	
	1	Inderapura	385	138	35.84	25	6.49	187	48.57	350	90.91	35	9.09	
	2	Muaro Sakai Inderapura	871	37	4.25	121	13.89	650	74.63	808	92.77	63	7.23	
	3	Tiga Sepakat Inderapura	455	159	34.95	-	-	238	52.31	397	87.25	58	12.75	
	4	Inderapura Barat	448	186	41.52	-	-	231	51.56	417	93.08	31	6.92	
	5	Inderapura Selatan	898	-	-	308	34.30	537	59.80	845	94.10	53	5.90	
	6	Kudo kudo Inderapura	741	280	37.79	-	-	411	55.47	691	93.25	50	6.75	
	7	Simpang Lama Inderapura	680	230	33.82	13	1.91	381	56.03	624	91.76	56	8.24	
	8	Tluk Amplu Inderapura	842	-	-	307	36.46	461	54.75	768	91.21	74	8.79	
	9	Inderapura Tengah	470	179	38.09	-	-	250	53.19	429	91.28	41	8.72	
	10	Tigo Sungai Inderapura	317	-	-	-	-	275	86.75	275	86.75	42	13.25	

VI	AIR PURA		3,691	421	11.41	-	-	2,908	78.79	3,329	90.19	362	9.81	
	1	Inderapura Timur	655	75	11.45	-	-	530	80.92	605	92.37	50	7.63	
	2	Inderapura Utara	233	75	32.19	-	-	131	56.22	206	88.41	27	11.59	
	3	Pulau Rajo Inderapura	266	-	-	-	-	223	83.83	223	83.83	43	16.17	
	4	Tluk Kualo Inderapura	302	-	-	-	-	259	85.76	259	85.76	43	14.24	
	5	Palokan Inderapura	314	1	0.32	-	-	251	79.94	252	80.25	62	19.75	
	6	Tanah Bakali Inderapura	766	115	15.01	-	-	571	74.54	686	89.56	80	10.44	
	7	Lubung Betung Inderapura	227	-	-	-	-	189	83.26	189	83.26	38	16.74	
	8	Damar Lapan Batang Inderapura	262	-	-	-	-	212	80.92	212	80.92	50	19.08	
	9	Muara Inderapura	308	125	40.58	-	-	243	78.90	368	119.48	-60	-19.48	
	10	Lalang Panjang Inderapura	358	30	8.38	-	-	299	83.52	329	91.90	29	8.10	
VII	LINGGO SARI BAGANTI		10,413	1,930	18.53	729	7.00	6,478	62.21	9,137	87.75	1,276	12.25	
	1	Air Haji	641	341	53.20	-	-	224	34.95	565	88.14	76	11.86	
	2	Pasar Lama Muara Air Haji	746	214	28.69	-	-	451	60.46	665	89.14	81	10.86	
	3	Muara Gadang Air Haji	487	251	51.54	-	-	172	35.32	423	86.86	64	13.14	
	4	Air Haji Barat	617	77	12.48	-	-	445	72.12	522	84.60	95	15.40	
	5	Pasar Bukit Air haji	550	-	-	-	-	455	82.73	455	82.73	95	17.27	
	6	Sei Sirah Air haji	507	-	-	160	31.56	269	53.06	429	84.62	78	15.38	
	7	Rantau Simalenang Air Haji	702	67	9.54	57	8.12	495	70.51	619	88.18	83	11.82	
	8	Air Haji Tengah	629	66	10.49	-	-	502	79.81	568	90.30	61	9.70	

	9	Air Haji Tenggara	764	42	5.50	-	-	650	85.08	692	90.58	72	9.42	
	10	Punggasan	570	106	18.60	-	-	371	65.09	477	83.68	93	16.32	
	11	Muara Kandis Punggasan	534	43	8.05	-	-	408	76.40	451	84.46	83	15.54	
	12	Punggasan Timur	861	58	6.74	142	16.49	578	67.13	778	90.36	83	9.64	
	13	Padang XI Punggasan	800	102	12.75	96	12.00	528	66.00	726	90.75	74	9.25	
	14	Lagan Mudik Punggasan	500	-	-	-	-	436	87.20	436	87.20	64	12.80	
	15	Lagan Hilir Punggasan	622	232	37.30	153	24.60	152	24.44	537	86.33	85	13.67	
	16	Punggasan Utara	883	331	37.49	121	13.70	342	38.73	794	89.92	89	10.08	
VIII	RANAH PESISIR		7,148	1,102	15.42	1,021	14.28	4,144	57.97	6,267	87.67	881	12.33	
	1	Sungai Tunu	632	-	-	203	32.12	347	54.91	550	87.03	82	12.97	
	2	Palangai	621	102	16.43	89	14.33	379	61.03	570	91.79	51	8.21	
	3	Sungai Tunu Barat	643	-	-	127	19.75	429	66.72	556	86.47	87	13.53	
	4	Sungai Tunu Utara	588	-	-	120	20.41	384	65.31	504	85.71	84	14.29	
	5	Nyiur Malambai Palangai	860	172	20.00	134	15.58	479	55.70	785	91.28	75	8.72	
	6	Palangai Kaciak	566	195	34.45	40	7.07	263	46.47	498	87.99	68	12.01	
	7	Palangai Gadang	612	171	27.94	20	3.27	318	51.96	509	83.17	103	16.83	
	8	Koto VIII Palangai	1,005	281	27.96	83	8.26	519	51.64	883	87.86	122	12.14	
	9	Pasia Palangai	747	181	24.23	-	-	478	63.99	659	88.22	88	11.78	
	10	Sungai Liku Palangai	874	-	-	205	23.46	548	62.70	753	86.16	121	13.84	
IX	LENGAYANG		12,121	2,998	24.73	1,549	12.78	7,158	59.05	11,705	96.57	416	3.43	
	1	Lakitan	996	458	45.98	-	-	533	53.51	991	99.50	5	0.50	
	2	Kambang	1,387	179	12.91	271	19.54	911	65.68	1,361	98.13	26	1.87	

	3	Lakitan Selatan	1,229	638	51.91	-	-	556	45.24	1,194	97.15	35	2.85	
	4	Lakitan Tengah	950	427	44.95	125	13.16	363	38.21	915	96.32	35	3.68	
	5	Lakitan Timur	466	277	59.44	-	-	183	39.27	460	98.71	6	1.29	
	6	Lakitan Utara	1,338	225	16.82	-	-	1,000	74.74	1,225	91.55	113	8.45	
	7	Kambang Barat	1,925	464	24.10	-	-	1,365	70.91	1,829	95.01	96	4.99	
	8	Kambang Utara	1,892	238	12.58	389	20.56	1,189	62.84	1,816	95.98	76	4.02	
	9	Kambang Timur	1,938	92	4.75	764	39.42	1,058	54.59	1,914	98.76	24	1.24	
X	SUTERA		11,643	4,017	34.50	660	5.67	5,967	51.25	10,644	91.42	999	8.58	
	1	Amping Parak	1,912	1,129	59.05	-	-	706	36.92	1,835	95.97	77	4.03	
	2	Surantih	1,828	1,078	58.97	-	-	649	35.50	1,727	94.47	101	5.53	
	3	Taratak	550	36	6.55	97	17.64	342	62.18	475	86.36	75	13.64	
	4	Ampiang Parak Timur	1,091	521	47.75	163	14.94	324	29.70	1,008	92.39	83	7.61	
	5	Aur Duri Surantih	1,184	643	54.31	-	-	493	41.64	1,136	95.95	48	4.05	
	6	Rawang Gunung Malelo Surantih	1,381	169	12.24	20	1.45	1,094	79.22	1,283	92.90	98	7.10	
	7	Koto Nan Tigo Selatan Surantih	832	237	28.49	-	-	508	61.06	745	89.54	87	10.46	
	8	Koto Nan Tigo Utara Surantih	573	148	25.83	-	-	348	60.73	496	86.56	77	13.44	
	9	Ganting Mudiak Selatan Surantih	664	-	-	143	21.54	432	65.06	575	86.60	89	13.40	
	10	Gantiang Mudiak Utara Surantih	566	-	-	115	20.28	363	64.13	478	84.42	88	15.58	
	11	Lansano Taratak	605	56	9.26	-	-	458	75.70	514	84.96	91	15.04	
	12	Koto Taratak	457	-	-	122	26.70	250	54.70	372	81.40	85	18.60	
XI	BATANG KAPAS		7,255	1,986	27.37	1,010	13.92	3,803	52.42	6,799	93.71	456	6.29	
	1	IV Koto Hilie	2,129	752	35.32	30	1.41	1,224	57.49	2,006	94.22	123	5.78	

	2	IV Koto Mudiek	583	285	48.89	40	6.86	248	42.54	573	98.28	10	1.72	
	3	Taluak	544	-	-	100	18.38	384	70.59	484	88.97	60	11.03	
	4	Koto Nan Tigo IV Koto Hilie	724	-	-	324	44.75	318	43.92	642	88.67	82	11.33	
	5	Koto Nan Duo IV Koto Hilie	1,092	-	-	109	9.98	875	80.13	984	90.11	108	9.89	
	6	Sungai Nyalo IV Koto Mudiek	588	477	81.12	65	11.05	20	3.40	562	95.58	26	4.42	
	7	Tuik IV Koto Mudiek	655	432	65.95	80	12.21	140	21.37	652	99.54	3	0.46	
	8	Taratak Tapatih IV Koto Mudiek	541	40	7.39	122	22.55	349	64.51	511	94.45	30	5.55	
	9	Taluk Tigo Sakato	399	-	-	140	35.09	245	61.40	385	96.49	14	3.51	
XII	IV JURAI		10,718	5,728	53.44	2,109	19.68	2,220	20.71	10,057	93.83	661	6.17	
	1	Painan	1,353	1,144	84.55	-	-	180	13.30	1,324	97.86	29	2.14	
	2	Painan Selatan	1,065	747	70.14	-	-	261	24.51	1,008	94.65	57	5.35	
	3	Painan Timur	1,153	898	77.88	-	-	210	18.21	1,108	96.10	45	3.90	
	4	Salido	1,752	1,164	66.44	-	-	526	30.02	1,690	96.46	62	3.54	
	5	Bungo Pasang Salido	906	467	51.55	240	26.49	152	16.78	859	94.81	47	5.19	
	6	Sago Salido	1,091	845	77.45	-	-	217	19.89	1,062	97.34	29	2.66	
	7	Tambang	416	35	8.41	279	67.07	78	18.75	392	94.23	24	5.77	
	8	Salido Sari Bulan	330	10	3.03	234	70.91	48	14.55	292	88.48	38	11.52	
	9	Koto Rawang	336	-	-	144	42.86	136	40.48	280	83.33	56	16.67	
	10	Bukit Kaciak Lumpo	241	171	70.95	-	-	31	12.86	202	83.82	39	16.18	
	11	Sungai Sariak Lumpo	180	-	-	130	72.22	20	11.11	150	83.33	30	16.67	
	12	Gunuang Bungkuak Lumpo	148	-	-	119	80.41	16	10.81	135	91.22	13	8.78	

	13	Ampang Tareh Lumpo	259	-	-	194	74.90	30	11.58	224	86.49	35	13.51	
	14	Ampuan Lumpo	233	30	12.88	139	59.66	46	19.74	215	92.27	18	7.73	
	15	Balai Sinayan Lumpo	144	14	9.72	103	71.53	14	9.72	131	90.97	13	9.03	
	16	Lumpo	235	166	70.64	-	-	43	18.30	209	88.94	26	11.06	
	17	Taratak Tangah Lumpo	250	37	14.80	35	14.00	146	58.40	218	87.20	32	12.80	
	18	Batu Kunik Lumpo	174	-	-	172	98.85	2	1.15	174	100.00	-	-	
	19	Limau Gadang Lumpo	234	-	-	163	69.66	30	12.82	193	82.48	41	17.52	
	20	Sungai Gayo Lumpo	218	-	-	157	72.02	34	15.60	191	87.61	27	12.39	
XIII	BAYANG		8,479	2,371	27.96	973	11.48	4,354	51.35	7,698	90.79	781	9.21	
	1	Pasar Baru	913	213	23.33	-	-	667	73.06	880	96.39	33	3.61	
	2	Talaok	495	164	33.13	-	-	322	65.05	486	98.18	9	1.82	
	3	Koto Barapak	554	105	18.95	-	-	381	68.77	486	87.73	68	12.27	
	4	Gurun Panjang	381	227	59.58	112	29.40	31	8.14	370	97.11	11	2.89	
	5	Api Api Pasar Baru	503	54	10.74	-	-	382	75.94	436	86.68	67	13.32	
	6	Tanjung Durian Pasar Baru	474	138	29.11	-	-	307	64.77	445	93.88	29	6.12	
	7	Asam Kamba Pasar Baru	466	49	10.52	-	-	357	76.61	406	87.12	60	12.88	
	8	Sawah Laweh Pasar Baru	700	-	-	20	2.86	617	88.14	637	91.00	63	9.00	
	9	Kapeh Panji Jaya Talaok	585	278	47.52	-	-	275	47.01	553	94.53	32	5.47	
	10	Aur Bagalung Talaok	479	28	5.85	-	-	393	82.05	421	87.89	58	12.11	
	11	Kapelgam Koto Berapak	503	361	71.77	-	-	62	12.33	423	84.10	80	15.90	
	12	Koto Baru Koto Berapak	371	-	-	303	81.67	19	5.12	322	86.79	49	13.21	

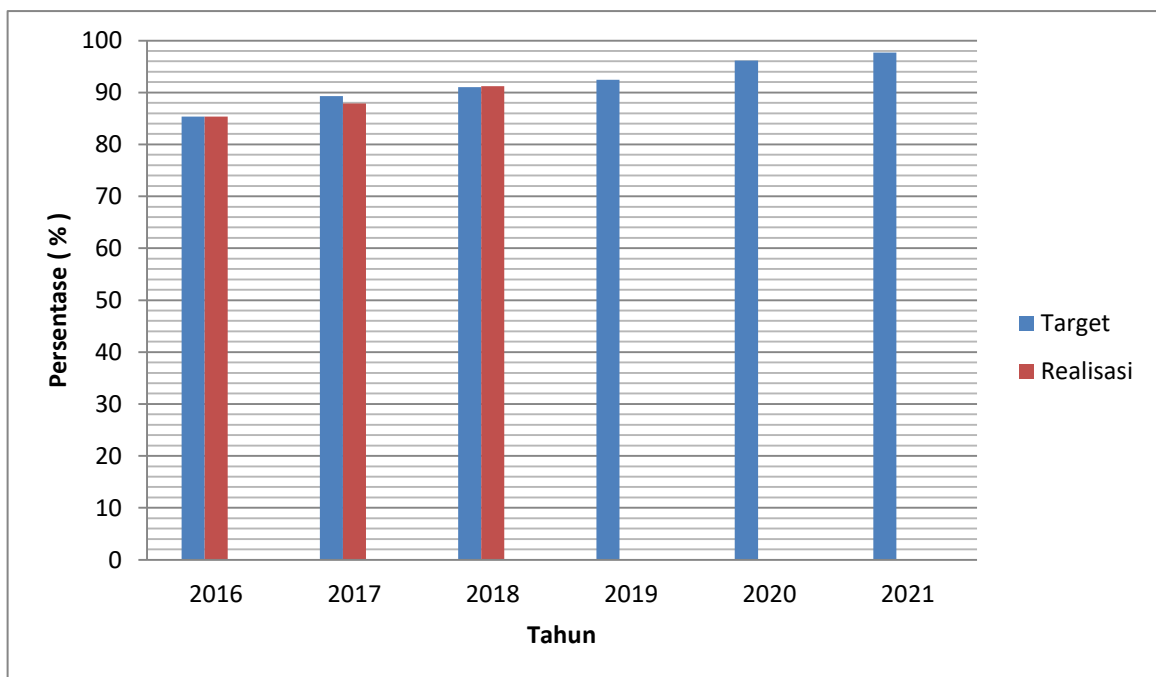
	13	Kubang Koto Berapak	349	-	-	223	63.90	37	10.60	260	74.50	89	25.50	
	14	Kapujan Koto Berapak	399	-	-	240	60.15	83	20.80	323	80.95	76	19.05	
	15	Gurun Panjang Utara	469	420	89.55	-	-	32	6.82	452	96.38	17	3.62	
	16	Gurun Panjang Barat	302	281	93.05	-	-	10	3.31	291	96.36	11	3.64	
	17	Gurun Panjang Selatan	536	53	9.89	75	13.99	379	70.71	507	94.59	29	5.41	
XIV	IV NAGARI BAYANG UTARA		1,677	181	10.79	716	42.70	508	30.29	1,405	83.78	272	16.22	
	1	Puluik Puluik	402	-	-	267	66.42	72	17.91	339	84.33	63	15.67	
	2	Puluik Puluik Selatan	448	181	40.40	80	17.86	104	23.21	365	81.47	83	18.53	
	3	Koto Ranah	213	-	-	110	51.64	70	32.86	180	84.51	33	15.49	
	4	Muaro Aie	90	-	-	25	27.78	36	40.00	61	67.78	29	32.22	
	5	Pancung Taba	263	-	-	197	74.90	44	16.73	241	91.63	22	8.37	
	6	Limau Gadang	261	-	-	37	14.18	182	69.73	219	83.91	42	16.09	
XV	KOTO XI TARUSAN		11,191	235	2.10	3,966	35.44	5,813	51.94	10,014	89.48	1,177	10.52	
	1	Kapuh	1,057	-	-	-	-	962	91.01	962	91.01	95	8.99	
	2	Kapuh Utara	440	-	-	179	40.68	224	50.91	403	91.59	37	8.41	
	3	Jinang Kp. Pansur Ampang Pulai	556	25	4.50	-	-	458	82.37	483	86.87	73	13.13	
	4	Pulau Karam Ampang Pulai	489	25	5.11	-	-	424	86.71	449	91.82	40	8.18	
	5	Ampang Pulai	846	49	5.79	91	10.76	675	79.79	815	96.34	31	3.66	
	6	Carocok Anau Ampang Pulai	254	21	8.27	116	45.67	98	38.58	235	92.52	19	7.48	
	7	Nanggalo	737	-	-	-	-	649	88.06	649	88.06	88	11.94	

	8	Setara Nanggalo	531	-	-	186	35.03	251	47.27	437	82.30	94	17.70	
	9	Batu Hampar Selatan	428	-	-	48	11.21	294	68.69	342	79.91	86	20.09	
	10	Batu Hampar	277	-	-	202	72.92	51	18.41	253	91.34	24	8.66	
	11	Mandeh	302	-	-	30	9.93	191	63.25	221	73.18	81	26.82	
	12	Sungai Nyalo Mudiak Aia	179	-	-	66	36.87	102	56.98	168	93.85	11	6.15	
	13	Sungai Pinang	311	-	-	-	-	252	81.03	252	81.03	59	18.97	
	14	Duku	929	-	-	659	70.94	234	25.19	893	96.12	36	3.88	
	15	Duku Utara	571	-	-	564	98.77	2	0.35	566	99.12	5	0.88	
	16	Barung Barung Balantai Selatan	386	-	-	88	22.80	240	62.18	328	84.97	58	15.03	
	17	Barung Barung Balantai Tengah	387	-	-	227	58.66	94	24.29	321	82.95	66	17.05	
	18	Barung Barung Balantai	563	115	20.43	210	37.30	150	26.64	475	84.37	88	15.63	
	19	Barung Barung Balantai Timur	310	-	-	215	69.35	61	19.68	276	89.03	34	10.97	
	20	Kampung Baru Korong Nan Ampek	421	-	-	280	66.51	82	19.48	362	85.99	59	14.01	
	21	Taratak Sungai Lundang	328	-	-	205	62.50	116	35.37	321	97.87	7	2.13	
	22	Siguntur Tua	196	-	-	151	77.04	25	12.76	176	89.80	20	10.20	
	23	Siguntur	693	-	-	449	64.79	178	25.69	627	90.48	66	9.52	

Mengacu pada renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021 berikut target yang ingin dicapai dalam indicator Cakupan air minum / bersih.

Tabel 3. 23 Target dan Realisasi Cakupan Air Minum / Bersih

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Target Capaian (%)	85,37	89,29	91,02	92,47	96,16	97,71
2	Realisasi (%)	85,37	87,86	91,22	-	-	-



Gambar 3.5

Target dan realisasi per tahun Cakupan Air Minum / Bersih menurut Renstra Revisi Tahun 2016 - 2021

Hasil Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sarana Air Minum pada tahun 2017 seperti terlihat pada gambar berikut :



Pembangunan SPAM JP Silaut di Kec. Silaut Tahun 2018

Capaian indicator persentase cakupan air minum /bersih di hitung dengan menggunakan rumus :

$$= \frac{\text{Jumlah rumah tangga pengguna air bersih}}{\text{jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$$

$$\frac{96.138}{105.394} \times 100\% = 91,22\%$$

Tabel 3.24

Capaian Kinerja Indikator Persentase Penduduk berakses air minum /bersih Tahun 2016 s/d 2018

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian		
			2016	2017	2018	2016	2017	2018
1.	Persentase cakupan air minum /bersih	%	85.37	87.86	91.22	100	98.40	100.22

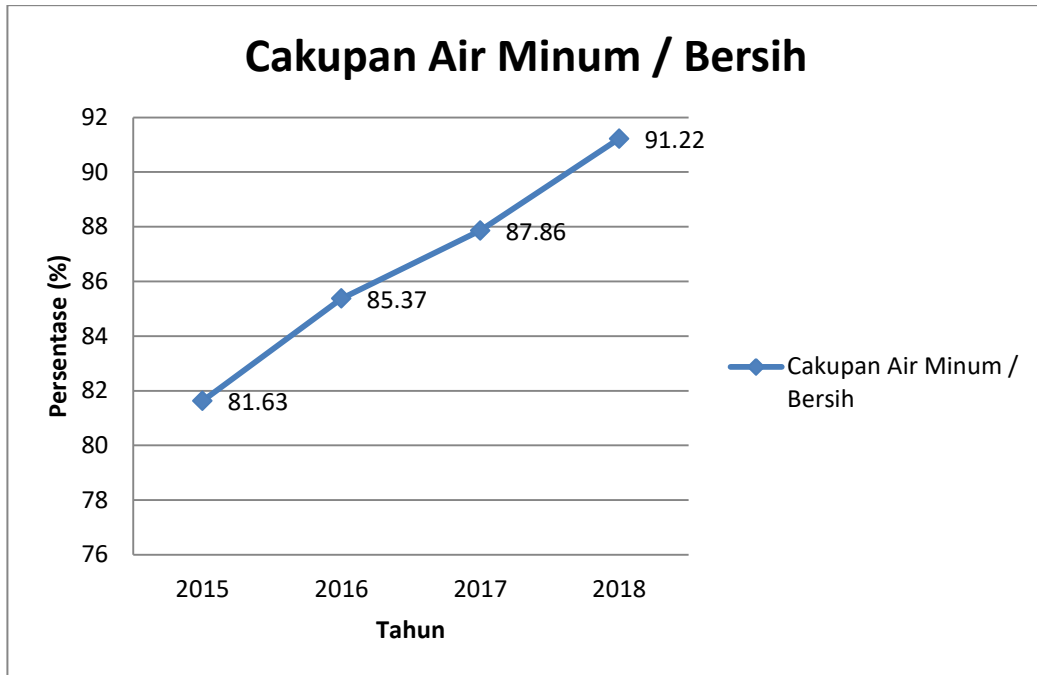
Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian indicator Persentase Penduduk berakses air minum /bersih dalam 2 (dua) tahun pelaksanaan RPJMD dalam kategori sangat baik .

Tabel 3.25

Kenaikan cakupan air minum/ bersih tahun 2015 s/d 2018

No	Uraian	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	Cakupan Air Minum / Bersih (%)	81.63%	85.37	87.86	91.22

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa cakupan air minum / bersih mengalami peningkatan 3.36 % pada tahun 2018.



Gambar 3.6 Kenaikan cakupan air minum/ bersih tahun 2015 s/d 2018

2. Persentase Cakupan Sanitasi

Capaian indicator Persentase Cakupan Sanitasi di hitung dengan menggunakan rumus di bawah ini :

$$= \frac{\text{Jumlah rumah tangga bersanitasi}}{\text{jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$$

Capaian indicator Persentase Cakupan Sanitasi tahun 2018 di peroleh dari data jumlah tambahan Rumah Tangga Bersanitasi Tahun 2018 dan sambungan Rumah IPAL Komunal tahun 2018.

Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi Pada Tahun 2018 Sebagai berikut :

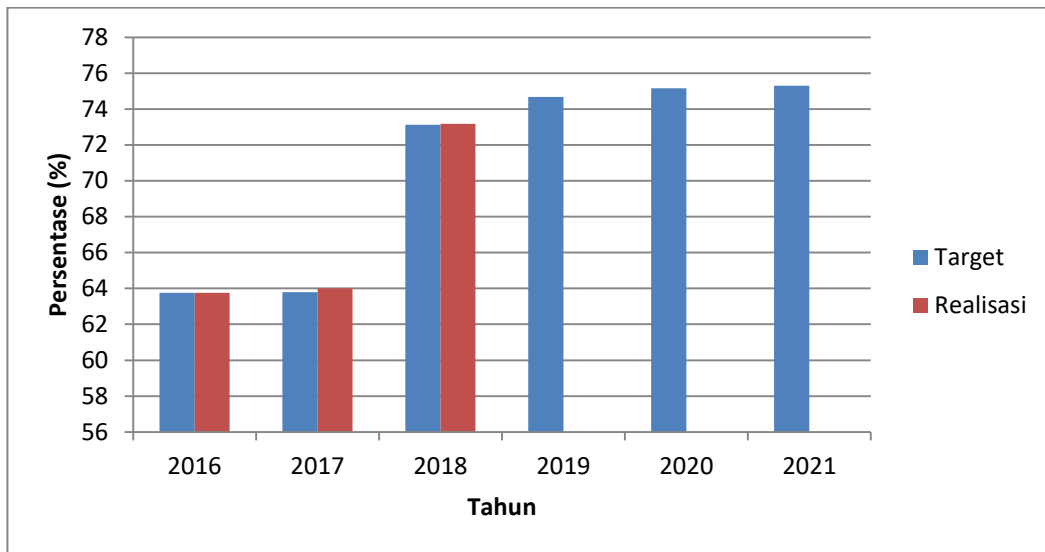
Tabel 3.26
Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi pada tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga yg Memiliki Jamban Sehat Tahun 2017	Tambahan Jamban Pribadi Tahun 2018	Tambahan Sambungan Rumah (SR) Kegiatan Dinas PUTR Tahun 2018	Tambahan Jumlah Rumah Tangga yg Memiliki Jamban Sehat Tahun 2018	Jumlah Rumah Tangga yg Memiliki Jamban Sehat Tahun 2018	Ket
		(RT)	(RT)	(RT)	(RT)	(RT)	(RT)	
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8	9
	JUMLAH	105,394	66,949	9,372	800	10,172	77,121	
I	SILAUT	3,479	1,815	433	-	433	2,248	
II	LUNANG	4,962	2,228	477	-	477	2,705	
III	BASA AMPEK BALAI TAPAN	3,179	1,696	498	-	498	2,194	
IV	RANAH AMPEK HULU TAPAN	3,494	1,727	500	-	500	2,227	
V	PANCUNG SOAL	6,107	3,419	584	-	584	4,003	
VI	AIR PURA	3,692	2,641	548	-	548	3,189	
VII	LINGGO SARI BAGANTI	10,413	7,484	820	-	820	8,304	
VIII	RANAH PESISIR	6,986	5,356	650	100	750	6,106	
IX	LENGAYANG	12,121	6,966	660	50	710	7,676	
X	SUTERA	11,643	9,244	720	100	820	10,064	
XI	BATANG KAPAS	7,255	3,753	520	150	670	4,423	
XII	IV JURAI	10,718	7,692	942	100	1,042	8,734	
XIII	BAYANG	8,477	5,341	750	100	850	6,191	
XIV	IV NAGARI BAYANG UTARA	1,677	859	300	-	300	1,159	
XV	KOTO XI TARUSAN	11,191	6,728	970	200	1,170	7,898	

Mengacu pada renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021 berikut target yang ingin dicapai dalam indikator Cakupan Sanitasi.

Tabel 3.27
Target dan realisasi Cakupan sanitasi

No	Uraian	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Target Capaian Setiap Tahun (%)	63.76	63.80	73.13	74.68	75.16	75.29
2	Realisasi (%)	63.76	64.01	73.17			



Gambar 3.7

Target dan realisasi per tahun Cakupan Sanitasi menurut Renstra Revisi Tahun 2016 – 2021

Hasil Pelaksanaan kegiatan Pembangunan IPAL Komunal pada tahun 2018 seperti terlihat pada gambar berikut :



Pembangunan Bak IPALD Lokasi Nagari Koto VIII Pelangai Kec. Ranah Pesisir Tahun 2018

Persentase Cakupan Sanitasi tahun 2018 adalah :

$$= \frac{\text{Jumlah rumah tangga bersanitasi}}{\text{jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$$

$$= \frac{77.121}{105.394} \times 100\% = 73,17 \%$$

Tabel 3.28

Capaian Kinerja Indikator Persentase Cakupan Sanitasi Tahun 2016 s/d 2018

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian		
			2016	2017	2018	2016	2017	2018
1.	Persentase Cakupan Sanitasi	%	63.76	64.01	73.17	100	100.33	100.05

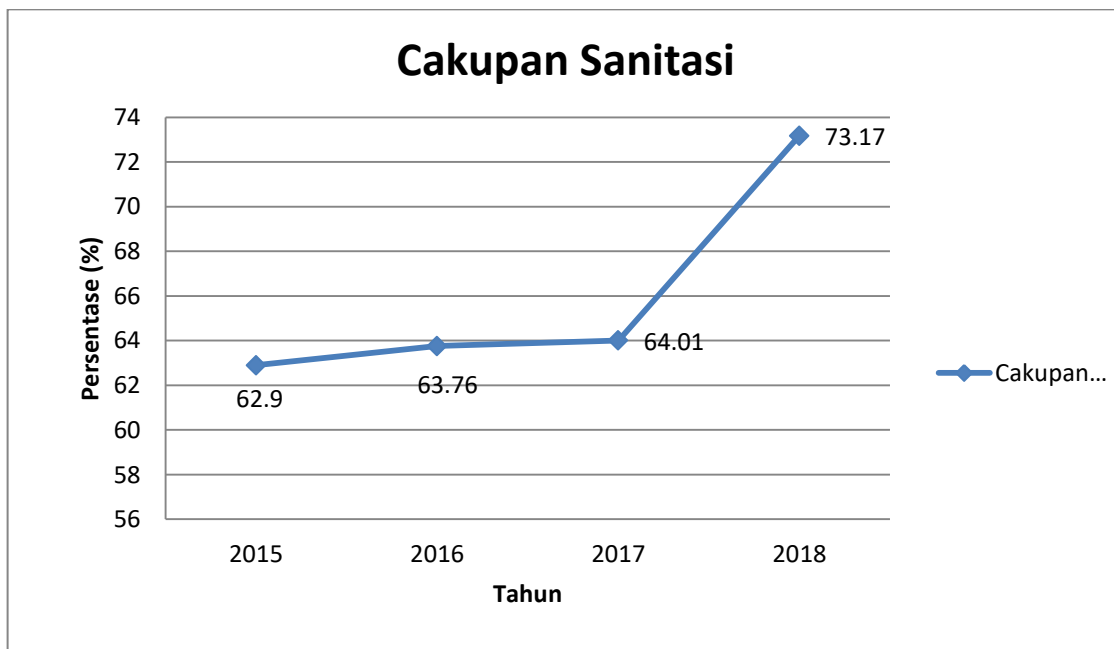
Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian indicator Persentase Cakupan Sanitasi dalam 2 (dua) tahun pelaksanaan RPJMD dalam kategori sangat baik .

Tabel 3.29

Kenaikan cakupan sanitasi tahun 2015 s/d 2018

No	Uraian	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	Cakupan Sanitasi (%)	62.90	63.76	64.01	73.17

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa cakupan sanitasi mengalami peningkatan 0.25 % pada tahun 2017.



Gambar 3.6 Kenaikan cakupan sanitasi tahun 2015 s/d 2017

Faktor – factor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat adalah :

1. Adanya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan, terutama oleh PPTK. Setiap keterlambatan pekerjaan oleh pelaksanaan segera ditindak lanjuti dan dicari solusinya
2. Koordinasi dengan stakeholder intens dilakukan, khususnya dalam penyusunan perencanaan SPAM sehingga permasalahan terjadi karena sulitnya mencari sumber air dengan debit besar dan tidak menimbulkan konflik sosial. Untuk mengatasi permasalahan ini, survey awal kelokasi sumber perlu dilakukan dan koordinasi sampai ke level Nagari
3. Koordinasi dengan stakeholder intens dilakukan, khususnya dalam penyusunan perencanaan SPAM sehingga permasalahan terjadi karena sulitnya mencari sumber air dengan debit besar dan tidak menimbulkan konflik sosial. Untuk mengatasi permasalahan ini, survey awal kelokasi sumber perlu dilakukan dan koordinasi sampai ke level Nagari
4. Melalui pembentukan Pokja Sanitasi Kabupaten, Kita dapat berperan aktif dalam setiap kegiatan ke Pokjaan sehingga pembinaan dan pendampingan terhadap pencapaian akses sanitasi Kabupaten Kota dapat terus ditingkatkan.
5. Disamping itu juga dibina hubungan antar instansi terutama yang terlibat langsung dalam pencapaian akses sanitasi terutama Dinas Kesehatan yang melakukan upaya peningkatan akses sanitasi melalui perubahan perilaku masyarakat yang biasa dikenal melalui program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Program – program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat tahun 2018 dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 3.30
Program yang mendukung pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian(%)
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	16.411.105.204,75	14.743.983.784	89,84
2	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	3.568.952.062,25	3.523.134.182	98,72
	Total	19.980.057.267	18.267.117.966	91,43

Program – program diatas tersebut di dukung oleh dana sebesar Rp. 19.980.057.267 terealisasi sebesar Rp. 18.267.117.966 atau 91,43 %. Ini berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 terdapat efisiensi anggaran sebesar 8,57% atau Rp. 1.712.939.301

Sasaran 3 : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

Sasaran ini merupakan salah satu sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan 2016 – 2021 Yakni : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Perekonomian Sosial Yang Terkait Dengan Sektor Unggulan Daerah. Indikator dari sasaran ini adalah Jumlah Pelayanan Publik berfungsi baik.

Jumlah Pelayanan public yang berfungsi dengan baik yang di maksud terbagi atas Bangunan Strategis , Gedung Negara dan Gedung Pelayanan Publik yang selesai dibangun dan siap di tempati pada tahun 2018.

Formulasi jumlah pelayanan public berfungsi dengan baik adalah : Jumlah bangunan pelayanan publik yang di bangun / Jumlah bangunan pelayanan publik yang dipelihara pertahun selama 5 tahun.

Program – program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indicator kinerja sasaran strategis meningkatnya Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik antara lain : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program – program diatas tersebut di dukung oleh dana sebesar Rp. 41.360.181.357,50 terealisasi sebesar Rp. 36.188.321.263 atau 87,5 %. Ini berarti

dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 terdapat efisiensi anggaran sebesar 12,5 % atau Rp.5.171.860.094

Hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Pelayanan Publik seperti terlihat pada gambar berikut:



Pembangunan Gedung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. IV Jurai Tahun 2018

Tabel 3.31

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah Pelayanan Publik berfungsi baik.	Unit	14	12	85,71%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan

Faktor – faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan public adalah :

1. Untuk mendukung pencapaian indikator ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus mengalokasikan sejumlah dana untuk pembangunan bangunan pemerintah seperti Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Pembangunan Auditorium Kantor Bupati Pesisir Selatan yang membutuhkan alokasi dana besar. Sehingga perlu dipilah prioritas bangunan yang harus diselesaikan dalam kurun waktu sepanjang Tahun 2018.

2. Pengawasan dan kontrol langsung dari pimpinan terkait penyelesaian pekerjaan

Sasaran 4 : Meningkatnya Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penataan Bangunan

Sasaran ini merupakan salah satu sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan 2016 – 2021 Yakni : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Perekonomian Sosial Yang Terkait Dengan Sektor Unggulan Daerah, sasaran ini memiliki 2 (dua) Indikator kinerja yakni :

1. Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang.
2. Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan tata bangunan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan sampai tahun 2018 telah menyusun Rencana Detail Tata Ruang sebanyak 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut:

1. Rencana Detail Tata Ruang Kota Tapan disusun tahun 2015
2. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Mandeh disusun tahun 2016
3. Rencana Detail Tata Ruang Kota Kambang tahun 2018

Rencana Tata Bangnan dan lingkungan sampai tahun 2018 disusun sebanyak 4 (empat) lokasi sebagai berikut:

1. Rencanan Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Carocok Painan
2. Rencana Tata bangunan dan lingkungan Kawasan Rumah Sakit Baru Painan
3. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Carocok Tarusan
4. Rencana Tata bangunan dan Lingkungan Kawasan Nagari Mandeh

Berikut ini gambaran capaian kinerja sasaran meningkatnya pelaksanaan penataan ruang dan penataan bangunan tahun 2018 untuk kesesuaian rencana pembangunan dengan detail tata ruang dengan target 20,30% dengan realisasi 31,25%, Karena pada tahun 2018, ada program/kegiatan penyusunan RDTR Kota Kambang yang merupakan acuan pada pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan rencana pembangunan, yang menjadikan realisasi melebihi target yang ada, contoh, adanya program Pembangunan Pasar, Perumahan, Perdagangan dan lain -lain. sedangkan untuk kesesuai pembangunan dengan rencana tata bangunan dan lingkungan dengan

target 17,24% dengan realisasi kegiatan 17,24%, karena target realisasi program/kegiatan sama dengan tahun sebelumnya, disebabkan tidak adanya anggaran kegiatan penyusunan RTBL untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.32.

Tabel 3.32

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penataan Bangunan Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang	%	20,30	31,25	153.94
2	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan tata bangunan	%	17.24	17.24	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang

Capaian Indikator persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang dengan rumus:



Rencana pembangunan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang di indentifikasi sebanyak 64 (enam puluh empat) Kegiatan Pembangunan sedangkan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 sebanyak 16 (enam belas) dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan permukiman baru
2. Penataan Parkir
3. Pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian sub zona pariwisata
4. Peningkatan jaringan alteri Sago Salido Painan
5. Pengadaan sarana pengakutan sampah
6. Pengelolaan sampah system composting di TPS
7. Peningkatan fungsi TPA
8. Pembangunan Tower
9. Penambahan jumlah sambungan air minum
10. Pembangunan drenase sekunder

11. Rehabilitasi jaringan drainase Sekunder
12. Peningkatan instansi pengelolaan limbah tinja
13. Penyusunan disain RTH
14. Peningkatan Pasar
15. Peningkatan Perumahan
16. Peningkatan Jalan Negara

2. Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan tata bangunan

Capaian Indikator persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan tata bangunan dengan rumus:



Rencana pembangunan dalam Rencana Tata bangunan dan lingkungan (RTBL) yang di indentifikasi sebanyak 58 (lima puluh delapan) Kegiatan sedangkan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 sebanyak 10 (sepuluh) dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Persiapan lahan
2. Pematangan lahan
3. Pembangunan jalan kawasan
4. Pembangunan saluran drenase
5. Pembuatan bak sampah TPS
6. Pengadaan dan pembuatan rambu penanda
7. Penempatan tempat sampah
8. Pembangunan ITC
9. Pembangunan rumah nelayan
10. Pemberdayaan masyarakat sadar wisata

Jumlah penyusunan Rencana Detail Tata Ruang/Rencana Tata Ruang Kawasan strategis di peroleh dari jumlah RDTR yang telah disusun pada tahun 2018

Program – program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indicator kinerja sasaran strategis meningkatnya Kualitas Penataan Ruang dan Penataan Bangunan antara lain : Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang.

Program – program diatas tersebut di dukung oleh dana sebesar Rp. 873.902.187,25 terealisasi sebesar Rp. 843.899.600 atau 96,57%. Ini berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 terdapat efisiensi anggaran sebesar 3,43 % atau Rp. 30.002.587,25

Sasaran 5 : Meningkatnya Kebersihan Lingkungan dan Kawasan Ruang Terbuka Hijau

Sasaran ini merupakan salah satu sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan 2016 – 2021 Yakni : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Perekonomian Sosial Yang Terkait Dengan Sektor Unggulan Daerah, sasaran ini memiliki 2 (dua) Indikator kinerja yakni :

1. Persentase sampah yang tertangani
2. Persentase kawasan penyediaan ruang terbuka hijau

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan penyusunan Rencana Detail Tata ruang berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 05/PRT/M/2018 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan terdiri dari:

1. Sepadan Sungai dan Pantai
2. Pemakaman
3. Lapangan olahraga
4. Taman skala Nagari, Kecamatan dan Kota
5. Hutan Kota
6. Taman Atap Bangunan

Untuk capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kebersihan Lingkungan dan Kawasan Ruang Terbuka Hijau tahun 2018 untuk Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dengan target 66,14% dengan realisasi program/kegiatan 66,14%, dengan adanya peningkatan luas RTH karena ada penambahan RTH Pada Penyusunan RDTR Kota Kambang Pada Tahun 2018, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.33

Tabel 3.33

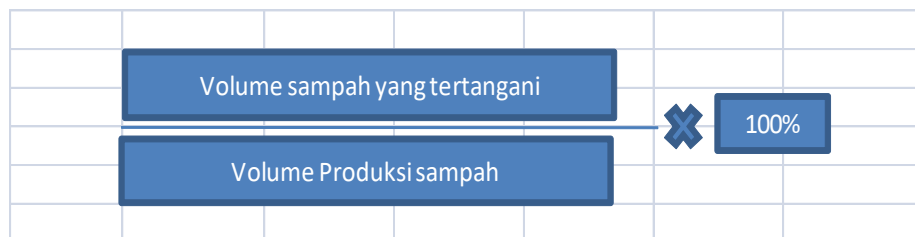
**Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kebersihan Lingkungan dan Kawasan Ruang
Terbuka Hijau 2018**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase sampah yang tertangani	%	39	37.20	95.38
2	Persentase kawasan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau	%	66,14	66,14	100

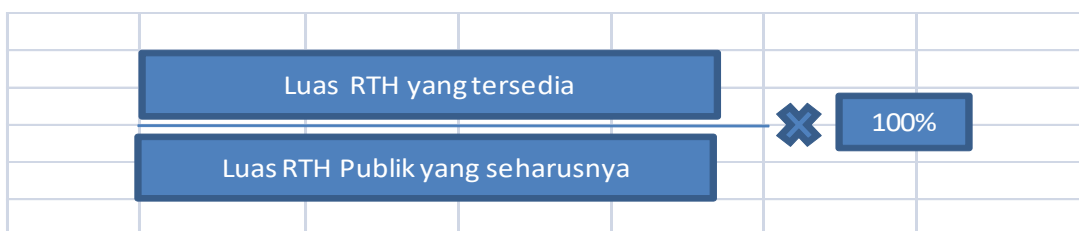
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Persentase sampah yang tertangani

Capaian Indikator persentase sampah yang tertangani dengan rumus:



2. Capaian Indikator persentase kawasan penyediaan ruang terbuka hijau dengan rumus:



Rencana Detail Tata Ruang sampai dengan tahun 2018 ruang Terbuka Hijau telah di indentifikasi seluas 1.172,71 Ha (57,69%) sedangkan luas RTH seharusnya sebesar 2.023,27 Ha berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang penyediaan RTH 20% dari luas Perkotaan, berdasarkan peraturan masih ada kekurangan penyediaan Ruang Terbuka Hijau sebesar 850,56 Ha (42,31%)

Program – program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indicator kinerja sasaran strategis meningkatnya Kebersihan Lingkungan dan Kawasan Ruang Terbuka Hijau Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

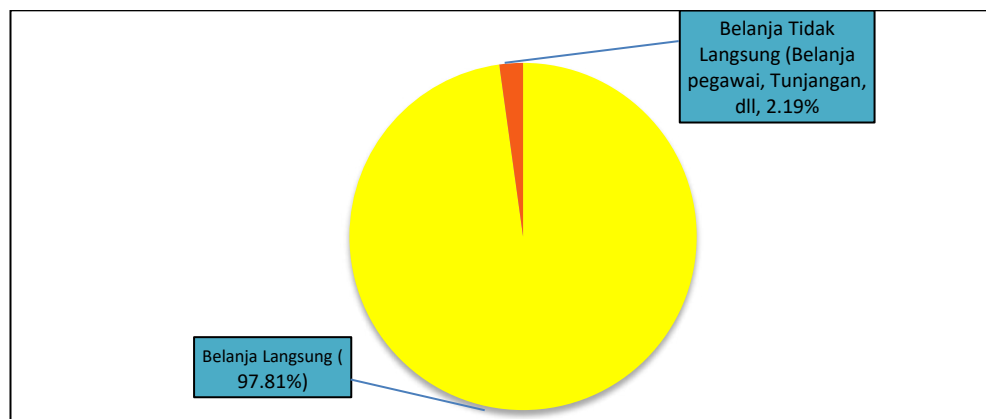
Tabel 3.34
Program yang mendukung pencapaian target indikator kinerja yang di tetapkan

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (RP)	Capaian (%)
1	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pertamanan	837.682.011	809.999.160	96,69
2	Program Pengembangan Kinerja dan Pengelolaan Persampahan	4.653.308.221,75	4.512.195.880	96,97
3	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	264.767.823,75	232.986.390	87,99
	Total	5.755.758.056,5	5.555.181.430	96,52

Program – program diatas tersebut di dukung oleh dana sebesar Rp. 5.755.758.056,5 terealisasi sebesar Rp. 5.555.181.430 atau 96,52 %. Ini berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 terdapat efisiensi anggaran sebesar 3.48% atau Rp. 200.576.626,5

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pagu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2018 adalah sebesar Rp.230.123.802.758 yang terdiri dari belanja langsung sebesar Rp.225.084.832.495 atau 97,81% dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.038.970.263 atau 2,19 % yang di gunakan untuk belanja pekerjaan pembangunan infrastruktur yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan infrastruktur masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.



Gambar 3.7 Persentase Belanja Dinas PUTR Kab. Pessel Tahun Anggaran 2018

Beberapa upaya percepatan dan efisiensi yang dilakukan sepanjang tahun 2018 atas instruksi Dinas sebagai berikut :

1. Menyusun dan menyiapkan administrasi (teknik dan keuangan) untuk percepatan anggaran
2. Adanya pengawasan dan control dalam pelaksanaan fisik kegiatan di lapangan.
3. Telah dilakukan dengan memanfaatkan komunikasi via email/hp sebagai alat koordinasi.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Anggaran dan Realisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 5 (lima) sasaran strategis yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018, tercantum pada table berikut :

Tabel 3.35

Anggaran dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Yang Menunjang Sasaran Strategis

NO.	SASARAN STRATEGIS	TAHUN 2018		
		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
		(Rp.)	(Rp.)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	81.994.311.074,4	75.247.473.638	91,78
2	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat	19.980.057.267	18.267.117.966	91,43
3	Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan publik	41.360.181.357,50	36.188.321.263	87,5
4	Meningkatnya pelaksanaan penataan ruang dan penataan bangunan	873.902.187,25	843.899.600	96,57
5	Meningkatnya kebersihan lingkungan dan kawasan ruang terbuka hijau	5.755.758.056,5	5.555.181.430	96,52
TOTAL		149.964.209.942,65	136.101.993.897	90,76

Sumber : Laporan Perkembangan Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2018

Dari tabel 3.35 diatas dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Plafon anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 untuk menunjang pencapaian 5 (lima) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 sebesar Rp 149.964.209.942,65 terealisasi sebesar Rp 136.101.993.897 atau 90,76%. Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian 5 (lima) sasaran strategis terdapat sisa anggaran sebesar 9,24% atau secara absolut sebesar Rp 13.862.216.045,65
- b. Sisa anggaran sebesar Rp 13.862.216.045,65 mencerminkan kurang akuratnya perencanaan dan penganggaran program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan. Seharusnya sisa anggaran ini dapat dipergunakan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada Bab III, Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018, yaitu:

1. Capaian Sasaran

Dari 5 (lima) sasaran yang telah ditetapkan, mempunyai capaian indikator kinerja mencapai 100% atau lebih, dan rata-rata nilai capaian indikator kinerja masing-masing sasaran adalah 100%, dengan nilai tertinggi adalah 153.94 % yaitu sasaran “Meningkatnya Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penataan Bangunan ”. Sedangkan nilai terendah 85.71 % yaitu sasaran “meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan publik”.

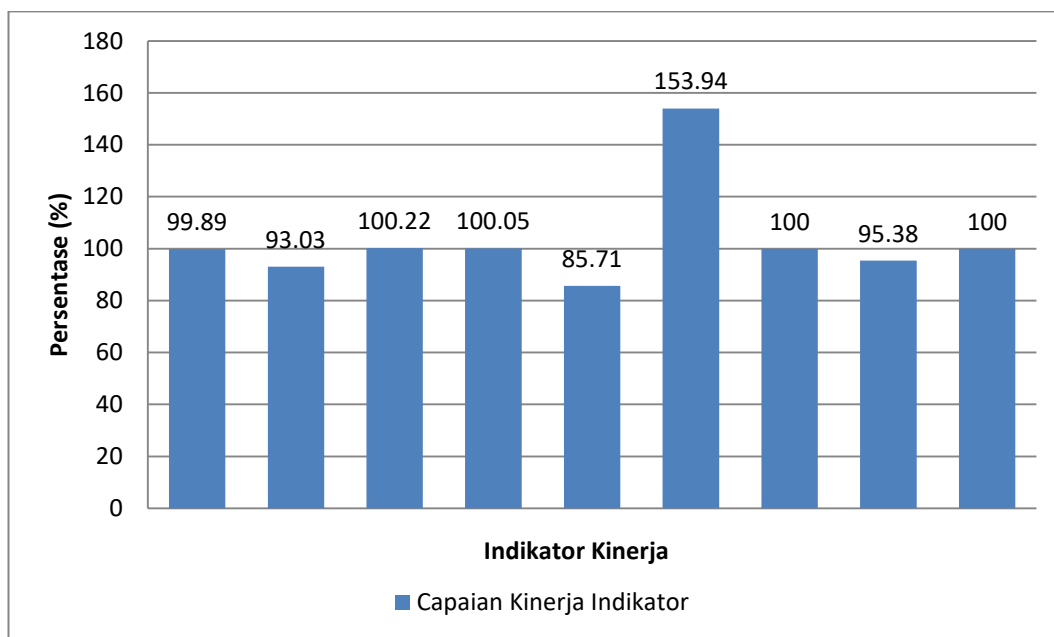
2. Capaian Indikator Kinerja

Dari 9 (sembilan) indikator kinerja yang telah ditetapkan, sebanyak 6 (enam) indikator kinerja berhasil mencapai target dan melampaui target 3 (tiga) indikator. Adapun rata-rata seluruh nilai capaian indikator kinerja adalah 100%, dengan nilai tertinggi adalah 153.94% yaitu indikator kinerja utama “Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang”, sedangkan nilai terendah 85.71% yaitu indikator kinerja utama “Jumlah bangunan pelayanan public berfungsi dengan baik”.

Tabel 3.36

Anggaran dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Yang Menunjang Sasaran Strategis

No	Sasaran	Indikator	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jalan dan Jembatan	1. Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik. 2. Persentase Jembatan Kondisi Baik.	99.89 93.03
2	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar masyarakat	1. Persentase cakupan air minum / bersih. 2. Persentase cakupan sanitasi.	100.22 100.05
3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	Jumlah bangunan pelayanan public berfungsi dengan baik	85.71
4	Meningkatnya Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penataan Bangunan.	1. Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang. 2. Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan tata bangunan.	153.94 100
5	Meningkatnya kebersihan lingkungan dan Kawasan ruang terbuka hijau	1. Persentase sampah yang tertangani. 2. Persentase kawasan penyediaan ruang terbuka hijau	95.38 100



Gambar 3.8
Capaian Kinerja Indikator

3. Capaian Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran

Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2018 terealisasi sebesar Rp 136.101.993.897 atau 90,76 % dari target alokasi yang ditetapkan sebesar Rp 149.964.209.942,65. Dari 5 (lima) sasaran strategis, capaian anggaran belanja sasaran strategis tertinggi adalah “Meningkatnya pelaksanaan penataan ruang dan penataan bangunan ” yaitu 96.57% dan terendah adalah “Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan publik” yaitu 87.5%.

B. SARAN

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain:

1. Adanya Peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kearah yang lebih baik walaupun belum seperti yang diharapkan, tapi telah sesuai dengan program dan kegiatan yang direncanakan
2. Sumber daya manusia Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasisir Selatan perlu penambahan dan peningkatan SDM.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasisir Selatan lebih baik dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparturnya.

4. Kendala – kendala yang di hadapi pada tahun 2018 dapat dijadikan cermin untuk antisipasi pada tahun – tahun berikutnya.

Demikianlah laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 ini kami buat dan sampaikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Painan, Februari 2019
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



ERASUKMA MUNAF, ST, MM

NIP. 19720925 199803 1 003